

**ANALISIS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL 4.0 DALAM PERMINTAAN
TENAGA KERJA DISEKTOR PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memeroleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Jurusan Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

NUR FITRIYA EKA NANDA

NIM. 1705036029

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023



PENGESAHAN

Nama : Nur Fitriya Eka Nanda
NIM : 1705036029
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1. Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perkembangan Teknologi Digital 4.0 Dalam
Permintaan Tenaga Kerja Diaktor Perbankan Syariah Indonesia.

Telah di munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal :


7 JUNI 2023


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata satu / S1) Perbankan Syariah.

Semarang, 10 Juli 2023

Mengetahui,

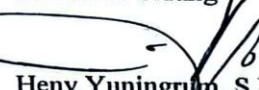
Ketua Sidang



Dr. H. Wahab, MM
NIP. 196909082000031001
Penguji I


Riska Wijayanti, M.H
NIP. 199304082019032019
Pembimbing I


Heny Yuningrum, S.E., M.Si
NIP.198106092007102005

Sekretaris Sidang


Heny Yuningrum, S.E., M.Si
NIP.198106092007102005
Penguji II


Erysa Najachah, M.A.
NIP. 199107192019032017
Pembimbing II


Muyassarrah, M.Si
NIP.197104292016012901





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

Nomor : 3162/Un.10.5/D.1/TA.00.01/9/2022

23 September 2022

Lamp. : -

Hal : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Heny Yuningrum, SE., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamuataikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : NUR FITRIYA EKA NANDA
NIM : 1705036029
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Judul skripsi : PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN
PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS KINERJA PARA
PEGAWAI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA
SELURUH PEGAWAI DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP
PANGKALAN BUN)

Maka, kami berharap kesediaanya Saudara untuk menjadi pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbing dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi

Untuk membatu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai pembimbing II Saudara/I MUYASSARAH, M.Si

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamuataikum Wr. Wb



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

“ Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah. ”

(Ayu Estiningtyas)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur senantiasa selalu tercurahkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat segala limpahan nikmat, ridho, hidayah serta inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini guna memenuhi Tugas Akhir perkuliahan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang khususnya dalam bidang akademik. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar pun berkat dorongan semangat serta doa-doa yang tak henti-hentinya dari orang-orang yang saya kasihi dan masih banyak lagi pihak lainnya. Oleh karena itu, Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan serta untuk orang-orang yang penting dalam hidup saya :

1. Kedua Orang Tua Saya, Ayahanda Muhammad Alwi (alm.) dan Ibunda Jamiah yang sangat saya cintai, saya kasihi, saya sayangi serta sangat saya banggakan, terimakasih untuk semua cinta serta kasih sayang yang tak terhingga dan tak pernah berhenti selalu tercurahkan untuk saya. Terima kasih untuk semua nasehat, semangat serta semua doa-doanya yang tak pernah henti-hentinya selalu terpanjatkan untuk saya. Terima kasih karena sudah sangat berjuang serta sangat berkerja keras untuk saya sampai saat ini, sehingga saya dapat menikmati semua pendidikan yang saya inginkan sampai saat ini.
2. Untuk semua Keluarga Besar Sutrisno Family, terima kasih banyak untuk semua kasih sayang, perhatian serta pengertiannya selama ini. Terima kasih juga untuk semua nasihat, saran, semangat, motivasi dan masih banyak lagi lainnya yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
3. Untuk semua Keluarga Besar Jumaidi Family, terima kasih banyak untuk semua kasih sayang, perhatian serta pengertiannya selama ini.
4. Untuk semua teman-teman Prodi S1 Perbankan Syariah angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, khusus nya untuk semua teman-teman PBAS-A angkatan 2017.
5. Untuk semua teman-teman Himpunan Mahasiswa Kalimantan UIN Walisongo Semarang.
6. Untuk semua teman-teman Kost Ibu Riyanti, terima kasih karena kalian bukan hanya menjadi teman ataupun sahabat tetapi kalian telah menjadi keluarga baru saya selama

saya berada disemarang dan sampai kapan pun. Terima kasih untuk 3 tahun yang sangat berharga dan berkesan.

7. Untuk sahabat-sahabat terbaik saya, Vinazalea Wong Kana, Qotrun Nada Salsabila Waris, Fitri Setiawati, Lissa Adah Khayatun Nufus, Siti Noor Hotik Hotizah, Noor Raniah, Nurul Izzani dan Sarimawati terima kasih banyak untuk semua kebaikan-kebaikan kalian semua selama ini, terima kasih juga karena kalian tetap selalu ada dan selalui menemani saya dalam kondisi apapun.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Maret 2023

Deklator



Nur Fitriya Eka Nanda

NIM. 1705036029

ABSTRAK

Semakin berkembangnya teknologi diberbagai bidang, pada akhirnya membawa masyarakat untuk memasuki era baru kehidupan yang biasa dikenal dengan era revolusi industri 4.0. Pada era baru ini teknologi diberbagai bidang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu yang juga mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat adalah bidang layanan keuangan khususnya pada sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana peran teknologi digital 4.0 dalam perkembangan sektor perbankan syariah indonesia serta untuk mengetahui apakah teknologi digital 4.0 berperan dalam permintaan tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk dokumentasi. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa, teknologi digital disektor perbankan terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keterbatasan pada penelitian ini adalah data yang digunakan merupakan data bulanan yang jangka waktunya terbatas hanya selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022, selain itu keterbatasan lain yang terdapat pada penelitian ini terdapat pada teknik analisis yang digunakan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Oleh karena itu, penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang cakupannya lebih luas dari penelitian sebelumnya, dan peneliti juga menyarankan untuk menggunakan metode serta teknik analisis data lainnya pada penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan temuan baru yang lebih relevan dan kompeten.

Kata Kunci : teknologi digital, revolusi industri 4.0, permintaan tenaga kerja, perbankan syariah.

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam penelitian ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 / 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Bacaan Madd:

Diftong:

ā = a panjang

i = i panjang

ū = u panjang

Bacaan

au = اُوْ

ai = اِيْ

iy = اِيْ

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur senantiasa selalu tercurahkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat segala limpahan nikmat, ridho, hidayah serta inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini guna memenuhi Tugas Akhir perkuliahan yang berjudul “ **ANALISIS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL 4.0 DALAM PERMINTAAN TENAGA KERJA DISEKTOR PERBANKAN SYARIAH INDONESIA** ” dengan baik dan lancar. Shalawat serta Salam tak lupa selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari zaman kegelapan sampai pada zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembaca, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam proses penulisan serta penyusunan skripsi ini tentu saja penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Heny Yuningrum, S.E., M.Si, Selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran guna memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis. Serta selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan, saran serta pengarahan selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini berlangsung.
4. Muyassarah, M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran guna memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis. Serta selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan,

saran serta pengarahan selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini berlangsung.

5. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag., Selaku Wali Dosen, yang telah memberikan semangat serta arahan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak bekal ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah melayani dengan baik selama masa perkuliahan sampai dengan selesainya masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah berperan serta dalam membantu penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, maka penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bentuk bantuan, semangat serta dukungannya selama ini.

Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan oleh semua pihak yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan selama masa penulisan serta penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak kebaikan serta keberkahan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan serta keterbatasan penulis. Akhir kata, penulis berharap agar Skripsi ini dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi dunia pendidikan dan dapat dijadikan implikasi selanjutnya bagi para mahasiswa.

Semarang, 23 Maret 2023

Penulis

Nur Fitriya Eka Nanda

NIM. 1705036029

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
MOTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Teknologi Digital	12
1.1. Pengertian Teknologi.....	12
1.2. Jenis-Jenis Teknologi.....	12
1.3. Manfaat Teknologi.....	14
1.4. Pengertian Teknologi Digital.....	16
1.5. Transformasi Digital	17
1.6. Kemudahan Sistem Digital	18
1.7.Dampak Transformasi Digital.....	18

B. Revolusi Industri 4.0	19
1.1. Pengertian Revolusi Industri 4.0.....	19
1.2. Sejarah Revolusi Industri 4.0.....	20
1.3. Karakteristik Revolusi Industri 4.0	20
1.4. Peluang Revolusi Industri 4.0	21
1.5. Tantangan Revolusi Industri 4.0	21
C. Tenaga kerja	33
1.1. Pengertian Tenaga Kerja	33
1.2. Klasifikasi Tenaga Kerja	35
1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja	36
1.4. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja	39
1.5. Tenaga Kerja Dalam Pandangan Ekonomi Islam	41
D. Permintaan Tenaga Kerja.....	42
1.1. Pengertian Permintaan Tenaga Kerja.....	42
1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja	47
1.3. Kategori Permintaan Tenaga Kerja.....	47
E. Perbankan Syariah	48
1.1. Pengertian Bank Syariah.....	48
1.2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	49
1.3. Visi Dan Misi Perbankan Syariah.....	50
1.4. Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	51
1.5. Fungsi Bank Syariah	51
1.6. Tujuan Bank Syariah.....	52
1.7. Produk-Produk Bank Syariah	54

BAB III GAMBARAN UMUM OJK 57

A. Latar Belakang Pembentukan OJK.....	57
B. Tujuan Pembentukan OJK	57
C. Visi Dan Misi OJK.....	58
D. Fungsi Dan Tugas OJK.....	58
E. Wewenang OJK	59
F. Nilai-Nilai OJK.....	60
G. Asas OJK	61
H. Struktur Organisasi OJK.....	62

I. Pimpinan OJK.....	62
J. Strategi OJK Untuk Merealisasikan Visi Dan Misi.....	63
K. Pembiayaan OJK.....	65
L. Hubungan Kelembagaan OJK.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	68
B. Hasil Penelitian	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Keterbatasan.....	75
C. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78
RIWAYAT HIDUP.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, baik dalam mengatur hubungan antara umat manusia dengan sang pencipta-Nya (Allah *Subhnanahu Wa Ta'ala*) dalam hal beribadah, ataupun mengatur hubungan antara sesama manusia dengan manusia lainnya sebagai makhluk ciptaan-Nya dalam hal bermuamalah. Islam datang secara komprehensif sebagai sumber dari segala sumber hukum utama bagi kehidupan umat manusia dimuka bumi ini yang berkaitan dengan akidah, syariat dan ahlakul karimah, yang kesemuanya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT dihari pembalasan kelak, yang tiada pertolongan lain selain hanya dari pertolongan Allah SWT. Syariat islam memiliki dua sisi yakni ibadah dan muamalah yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, dan keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk beribadah serta taat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, islam menghendaki setiap umat manusia tidak mengedepankan salah satu sisi saja, melainkan harus mengedepankan keduanya secara bersamaan (balance).¹

Perbankan syariah sendiri merupakan bagian dari ekonomi islam yang termasuk bagian dari integrasi syariat islam, dan dalam pelaksanaannya diarahkan untuk taat kepada Allah SWT, karena setiap ketaatan tersebut merupakan sebuah ibadah. Bank sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah badan atau lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau jasa. Serta, bank juga memiliki kegiatan lainnya seperti memberikan pelayanan lainnya kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa bank lainnya dalam rangka guna meningkatkan taraf kehidupan banyak rakyat. Sedangkan, pengertian dari perbankan syariah itu sendiri adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada BAB 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “ *Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan*

¹La Ode Alimusa, S.E., M.Si. *Manajemen Perbankan Syariah Satu Kajian Ideologis Dan Teoritis*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2020), Hal. 3

usahanya”. Dan dijelaskan pula dalam Pasal 7 bahwa “ *Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* ”.²

Di era globalisasi seperti saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pertumbuhan serta perkembangan diseluruh aspek kehidupan, salah satunya terjadi pada aspek perekonomian dunia yang tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu lembaga keuangan yang juga mengalami perkembangan yang sangat pesat pada saat ini ialah sektor perbankan. Masyarakat yang berada di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan keberadaan sektor perbankan guna melakukan transaksi keuangannya dikarenakan mereka menganggap bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangannya. Selain itu, bank sendiri memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian disuatu negara, dikarenakan semakin maju suatu negara tersebut maka akan semakin besar pula peranan sektor perbankan dalam mengendalikan suatu negara tersebut.

Selain itu, saat ini dunia industri juga tengah memasuki era baru yang sering disebut dengan revolusi industri 4.0 . Revolusi industri 4.0 atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cyber physical sistem*” adalah suatu era perubahan dari berbagai sektor kehidupan yang ditandai dengan adanya perkembangan didalam bidang teknologi yang begitu pesat, dan perkembangan teknologi tersebut dapat mempercepat tersebarnya suatu informasi atau lebih dari satu orang ke orang yang lainnya. Konsep penerapannya dilakukan secara otomatis yang dibantu oleh teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya.

Seiring dengan perkembangan dunia industri 4.0 kearah digitalisasi, menyebabkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat mulai beralih mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan tengah berkembang pada saat ini, dikarenakan perkembangan tersebut memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan masyarakat banyak. Selain itu, perkembangan tersebut juga merambah ke sektor financial. Salah satu lembaga keuangan yang juga mengalami perkembangan teknologi 4.0 tersebut ialah sektor perbankan.

Sektor perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang juga sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, selain itu sektor perbankan juga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian indonesia, dikarenakan sektor perbankan telah menjadi salah satu industri jasa lembaga keuangan yang memberikan sumbangan terhadap

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB I, Pasal 1 dan Pasal 7.

pendapatan nasional, selain itu sektor perbankan juga berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan perekonomian yang bersifat produktif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong digitalisasi perbankan dengan mengeluarkan peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) ini menyebutkan “ layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan (*custome experience*) serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan”. Dengan adanya peraturan OJK tersebut maka diharapkan sektor perbankan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen.³

Saat ini kegiatan transaksi disektor perbankan telah banyak yang menggunakan teknologi digital yang berbasis komputer seperti halnya, Automated Teller Machine (ATM), Banking Application System, Internet Banking, Mobile Banking dan lain sebagainya. Peningkatan pelayanan untuk para pelanggan (nasabah) disektor perbankan merupakan usaha dari sektor perbankan tersebut guna dapat menembus batasan-batasan ruang dan waktu yang hanya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. Selain itu, pada saat yang bersamaan teknologi ini juga akan menjadi senjata bagi bank-bank yang bersangkutan untuk dapat bersaing dengan bank-bank lainnya, terutama dalam usaha untuk menciptakan suatu produk pelayanan yang lebih baik, lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat dibandingkan bank lainnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dimiliki oleh suatu bank tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berpengalaman dibidang perbankan. Namun pada kenyataannya, di era teknologi digitalisasi industri 4.0 banyak kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM), pada saat ini perlahan-lahan mulai berubah dan mulai digantikan oleh sistem digitalisasi dan komputer. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan keterlibatan tenaga manusia mulai berkurang dan perlahan-lahan mulai digantikan oleh teknologi digital.

³ Anisa Indah Mutiasari, *Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital*, Vol. Ix, No. 2, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 2020, Hal. 32 - 33

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka pada penelitian ini penulis ingin menemukan fakta tentang sejauh mana perkembangan teknologi digital dan revolusi industri 4.0 terhadap permintaan tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya sebagai judul penelitian, yang berjudul “ **ANALISIS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL 4.0 DALAM PERMINTAAN TENAGA KERJA DISEKTOR PERBANKAN SYARIAH INDONESIA** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran teknologi digital 4.0 dalam perkembangan sektor perbankan syariah di indonesia ?
2. Apakah teknologi digital 4.0 berperan dalam permintaan tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran teknologi digital 4.0 dalam perkembangan sektor perbankan syariah indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah teknologi digital 4.0 berperan dalam permintaan tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan ada beberapa hal yang dapat diambil dengan tujuan memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi latihan serta pembelajaran dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman ilmiah.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, landasan berpijak dan referensi dalam bidang akademik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, landasan dan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan penelitian yang sama di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang “ **ANALISIS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL 4.0 DALAM PERMINTAAN TENAGA KERJA DISEKTOR PERBANKAN SYARIAH INDONESIA** ”, penulis berusaha untuk mencari, menelusuri serta menela’ah tentang berbagai hasil kajian guna mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah berbagai kajian-kajian yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, penelitian Almatlus Setya Marsudi dan Yunus Widjaja (Jurnal IKRAITH EKONOMIKA Vol. 2, No.2, 2019) yang berjudul “ *Industri 4.0 Dan Dampaknya Terhadap Financial Technology Serta Kesiapan Tenaga Kerja Di Indonesia* ” pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang hasil penelitian yaitu, revolusi industri 4.0 yang berdampak pada perubahan bisnis *fintech* menciptakan hal positif salah satunya adalah terbukanya lapangan pekerjaan dan bentuk baru kebutuhan tenaga kerja yang memiliki karakteristik :

1. Mampu mengesplotasi teknologi agar lebih dapat mempromosikan diri sendiri.
2. Mampu mensinergikan akan pengalaman dan prestasi dengan kebutuhan tenaga kerja dengan memanfaatkan teknologi.
3. Memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi atas berbagai perubahan lingkungan yang terus berkembang dengan memanfaatkan kemampuan kritis akan perubahan teknologi.
4. Memiliki kemampuan untuk mendemonstrasikan kemampuan yang ada dengan peralatan berteknologi tinggi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang teknologi industri 4.0, dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian ini membahas dampak terhadap financial technology serta kesiapan tenaga kerja di indonesia, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang perkembangan teknologi digital 4.0 dalam permintaan tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia.

Kedua, penelitian I Gusti Ayu Diah Dhynasaridewi (Jurnal Kompleksitas, Vol. IX, No.1, 2020) yang berjudul “ *Analisis Digitalisasi Industri, Penciptaan Kesempatan Kerja Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia* ” pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang hasil penelitian yaitu :

1. Perdebatan akan kekhawatiran digantikannya pekerjaan manusia oleh robot pintar adalah akibat dari digitalisasi produksi.
2. Sedangkan, kekhawatiran bahwa pekerjaan akan hilang karena pengambil alihan oleh pekerja paruh waktu sesuai kebutuhan dan flatfrom bisnis adalah akibat dari digitalisasi pekerjaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang analisis digitalisasi industri, sedangkan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis yaitu, pada penelitian ini membahas tentang penciptaan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran di indonesia, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang permintaan tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia.

Ketiga, penelitian Hasan Ashari dan Trinandari Prasetyo Nugrahanti (Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 8, No. 2, 2020) yang berjudul “ *Analisis Kesiapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menghadapi Era Industri 4.0* ” pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang hasil penelitian yaitu, tidak ada BPR yang memiliki kesiapan dengan kategori baik. Maksimal kesiapan BPR adalah masuk kategori “ cukup ”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator keuangan. Analisis yang digunakan adalah LDR dan LoA.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang analisis industri 4.0, sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian ini membahas tentang kesiapan Bank Perkreditan Rakyat dalam menghadapi era industri 4.0 dan analisis data yang digunakan adalah LDR dan LoA, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang analisis perkembangan teknologi digital 4.0 dalam permintaan tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman.

Keempat, penelitian Hadi Adha, Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma (Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5 No. 2, 2020) yang berjudul “ *Digitlisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia (Industrial Digitalization And Its Impact On Labor And Employment Relationships In Indonesia)* .” Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang hasil penelitian yaitu, revolusi teknologi yang secara

fundamental akan mengubah bahkan telah mengubah cara hidup kita, cara kita berkerja dan cara kita berhubungan satu sama lain baik dalam skala cakupan dan kerumitannya, transformasi yang kita alami saat ini tidak seperti yang dialami manusia seperti pada revolusi industri sbelumnya. Jika revolusi industri pertama membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat, maka revolusi industri 4.0 yang berasaskan digitalisasi hanya membutuhkan waktu kurang dari satu dekade untuk melakukannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang revolusi industri 4.0 dan ketenagakerjaan, sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian ini membahas tentang hubungan kerja di indonesia sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang peran teknologi digital 4.0 dalam permintaan tenaga kerja disektor perbankan syariah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Melalui metode ini, penulis ingin menganalisis tentang Perkembangan Teknologi Digital 4.0 Dalam Permintaan Tenaga Kerja Disektor Perbankan Syariah Indonesia. Adapun analisis tersebut akan dideskripsikan melalui kata-kata dan diperjelas menggunakan hasil dari pengujian data tentang tenaga kerja yang terdapat disektor perbankan syariah indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data tentang tenaga kerja yang terdapat pada sektor perbankan syariah indonesia yang didapatkan dari data statistik perbankan syariah indonesia periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022. Data statistik tersebut telah resmi dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di website resmi OJK.⁴

2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder sendiri ialah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-

⁴<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>

sumber tidak langsung atau tangan kedua, misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa kumpulan-kumpulan data tentang tenaga kerja yang terdapat disektor perbankan syariah indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022. Data tentang tenaga kerja tersebut didapatkan dari data statistik perbankan syariah indonesia yang telah dipublikasikan langsung oleh website resmi milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022.

Selain itu, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data tentang perkembangan transaksi digital dibidang layanan keuangan indonesia. Dan diperkuat juga melalui buku-buku, jurnal-jurnal terkait dan lain sebagainya.

3. Data Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa data penelitian merupakan keterangan atau bahan yang bisa dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis data penelitian dan simpulan dalam suatu penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data statistik perbankan syariah indonesia tentang tenaga kerja yang terdapat pada sektor perbankan syariah indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022.

Selain itu, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data tentang perkembangan transaksi digital dibidang layanan keuangan. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat telah membawa masyarakat untuk memasuki era baru kehidupan, era baru tersebut biasa disebut dengan era revolusi industri 4.0. Pada era ini pemanfaatan berbagai teknologi dibidang layanan keuangan telah membawa perubahan yang signifikan, salah satunya pada sektor perbankan. Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital.

Di Indonesia sendiri perkembangan transaksi digital mengalami perkembangan yang sangat pesat yakni sebesar 1.556 % dalam kurun waktu 2017 sampai dengan kurun waktu 2020. Pada tahun 2021 transaksi uang elektronik mencapai Rp. 786,35 Triliun, nilai tersebut meningkat Rp. 281,39 Triliun (55,73 %) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp. 504,96 Triliun.⁵

⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774>

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses penelitian dimana peneliti melakukan teknik ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang memiliki arti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi itu sendiri memiliki arti yaitu cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang telah ada. Menurut Arikunto (2000) metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan pada penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut, dan data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.

Data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara mendokumentasikan laporan tentang data tenaga kerja yang berada disektor perbankan syariah indonesia yang terdaftar pada data statistik perbankan syariah indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022. Data-data tersebut didapatkan langsung dari website resmi milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman pun mengkualifikasikan aktivitas dalam analisis data kedalam tiga tahapan,⁶ yaitu :

a. Data Reduction (*Reduksi Data*)

Langkah pertama dalam teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik mereduksi data. Mereduksi data sendiri memiliki arti yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

⁶ Dr. H. Zuhcri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021), Hal. 160

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pencarian dan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

b. Data Display (*Penyajian Data*)

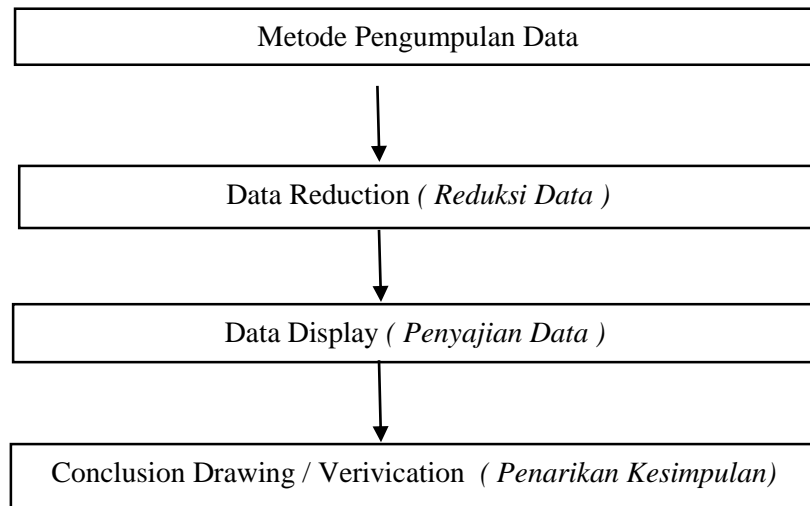
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik penyajian data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan cara mendisplaykan data maka akan dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.

Pada penelitian ini teknik penyajian datanya disajikan dalam bentuk bagan. Bagan-bagan tersebut berisikan data-data tentang tenaga kerja yang berada disektor perbankan syariah indonesia yang terdaftar pada data statistik perbankan syariah indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022. Selain menggunakan bagan, teknik penyajian data pada penelitian ini juga diperkuat dan diperjelas dengan menggunakan teks yang naratif.

c. Conclusion Drawing / Verivication (*Penarikan Kesimpulan*)

Langkah ketiga dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik conclusion drawing/ verivication (*penarikan kesimpulan*) pada penelitian ini yaitu, kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif, dan kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang telah dilakukan interpretasi dan pembahasan.



Gambar 1.1 Kerangka Teknik Analisis Data

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini mempunyai tujuan dengan memaparkan hasil pemikiran penulis dari awal sampai akhir. Ada beberapa rencana yang telah disusun dengan sistematika penulisan, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada BAB I ini berisikan pemaparan terkait pendahuluan alasan mengapa peneliti terkait untuk mengambil penelitian dalam permasalahan ini. Selain itu, pada bab ini terdapat 7 sub bab yang menjelaskan mulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Maka dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang isi tulisan secara keseluruhan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB II ini berisi tentang tinjauan pustaka, selain itu mengenai teori apa saja yang digunakan untuk landasan penelitian. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori teknologi digital, sumber daya manusia, permintaan tenaga kerja dan perbankan indonesia.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada BAB III ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Yang dimana pada gambaran umum pada penelitian ini merupakan gambaran umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada BAB IV ini berisi tentang analisis dan pembahasan. Dalam BAB ini menjelaskan tentang pengumpulan data tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia, pereduksian data tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia, penyajian data tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia dan penarikan kesimpulan.

BAB V Penutup

Pada BAB V ini berisi tentang kesimpulan yang telah di analisis, selain itu dalam penelitian juga berisikan keterbatasan dan saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teknologi Digital

1.1. Pengertian Teknologi

Secara etimologi, teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “ Techno ” yang memiliki arti keahlian dan “ Logia ” yang memiliki arti pengetahuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata teknologi memiliki arti yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Manuel Castells menyatakan bahwa “ teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan.”

Selain itu, Gary J. Anglin juga menyatakan bahwa “Teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia.”⁷

Rogers, juga menyatakan bahwa teknologi merupakan suatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan, dan dikatakan juga bahwa teknologi umumnya mempunyai dua komponen yaitu aspek perangkat keras yang berupa peralatan dan aspek perangkat lunak yang berupa informasi⁸

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan serta kenyamanan hidup bagi manusia yang penerapan pengetahuan ilmiahnya untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia tersebut atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia.

⁷ Fatah Syukur NC, *Teknologi Pendidikan*, (Semarang :Rasai Media Group, 2008), Hlm. 117.

⁸ Ishak, Deni Darmawan, *Teknologi Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), Hlm. 179.

1.2. Jenis-Jenis Teknologi

Teknologi memiliki berbagai macam jenis, sesuai dengan penerapan bidang yang digunakan demi memudahkan pekerjaan. Berikut adalah jenis-jenis teknologi yang dapat kita temukan didalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu :

1. Bidang Komunikasi Lisan

Ketika teknologi belum berkembang seperti saat ini, seseorang kesulitan untuk berkomunikasi secara lisan dengan orang lainnya yang letaknya berjauhan. Saat ingin berkomunikasi jalan satu-satunya adalah mereka harus saling bertemu terlebih dahulu. Namun kini, kita dapat dengan sangat mudah untuk melakukan komunikasi secara lisan tersebut meskipun jaraknya berjauhan. Kita dapat berbicara secara langsung kepada seseorang yang ingin kita hubungi meskipun jaraknya sangat jauh, hal tersebut didukung dengan adanya pesawat telepon. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga semakin banyak terciptanya ala-alat komunikasi yang lebih canggih lagi seperti radio, televisi dan internet. Bahkan saat teknologi satelit dan komunikasi jarak jauh dapat dilakukan tanpa kabel atau yang biasa di kenal dengan telepon seluler. Tak hanya itu, saat ini telepon-telpon seluler tersebut telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang jauh lebih canggih lagi, sehingga saat ini kita dapat dengan mudah melakukan komunikasi kapanpun, dimanapun dan dari belahan dunia manapun. Telepon seluler yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih itu biasa disebut dengan smart phone. Tak hanya dapat berkomunikasi secara lisan saja tapi dengan adanya smart phone tersebut kita dapat mengakses berbagai macam informasi yang kita inginkan. Dan tak hanya itu, dengan adanya smart phone tersebut kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan kita hanya dengan 1 barang tersebut seperti halnya, kita dapat melakukan pembelajaran ataupun pekerjaan secara online melalui fitur-fitur yang ada didalam smart phone tersebut, selain itu kita dapat melakukan transaksi jual beli melalui smart phone tersebut dan tentunya dibantu dengan adanya fitur-fitur canggih tentang jual beli yang ada di dalam smart phone tersebut. Dan masih banyak lagi kegiatan lain yang dapat kita lakukan melalui smart phone tersebut.

2. Bidang Teknologi Makanan dan Obat-Obatan (Farmasi)

Teknologi juga mempengaruhi perkembangan dalam produksi makanan dan obat-obatan, salah satu kendala yang dihadapi dalam produksi makanan adalah makanan yang cepat rusak dan sulit untuk disimpan dalam waktu yang lama. Salah

satu contoh perkembangan teknologi pada dunia kuliner / makanan adalah dengan cara metode pengawetan yang dimana bahan mentah diolah dan diproses menjadi makanan siap saji yang mampu bertahan lama serta tidak cepat membusuk.

Selain makanan, teknologi juga berperan dalam dunia pengembangan obat-obatan atau bidang farmasi. Untuk memproses obat-obatan pun teknologi yang digunakan pun telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dahulu masyarakat hanya meramu dan menumbuk obat-obatan dari bahan alami. Saat ini meskipun bahannya ada yang terbuat dari bahan yang alami tetapi proses pengolahannya telah menggunakan teknologi mesin. Dengan adanya tenaga mesin maka proses pembuatan obat menjadi lebih cepat dan higienis serta dalam penerapannya memiliki disiplin teknologi farmasi.

3. Bidang Teknologi Transportasi Masal

Prinsip dasar dari pengembangan transportasi adalah usaha untuk meningkatkan kinerja pergerakan penumpang dan barang dengan berpatokan pada indikator jenis dan karakteristik teknologi transportasi, dalam hal ini tingkat pelayanan dan operasi sistem dan kompleksnya permasalahan.⁹ Dalam hal ini, teknologi merupakan merupakan indikator pengembangan transportasi, salah satunya adalah perkembangan ojek yang sebelumnya berupa ojek pangkalan kini menjadi ojek yang berbasis online dengan memanfaatkan ponsel pintar (smart phone). Tak hanya menjadi alat transportasi untuk mengantar jemput seseorang menggunakan motor ataupun mobil saja, ojek online pun memiliki banyak keunggulan lainnya seperti, dapat melakukan pemesanan barang ataupun makanan, dapat melakukan pengantaran serta penjemputan barang / kurir dan lain sebagainya.

4. Bidang Teknologi Perbankan dan Keuangan

Sektor perbankan pun tak luput dari perkembangan teknologi yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika dahulu saat ingin melakukan berbagai macam transaksi para nasabah harus datang langsung dan mengantri di bank yang ingin dituju, maka pada saat ini dengan adanya perkembangan teknologi yang ada di sektor perbankan maka kegiatan transaksi dapat dilakukan melalui online dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Seperti halnya saat ingin melakukan transaksi tarik tunai, para nasabah saat ini dapat melakukan

⁹ Rudi Azis, Arul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2014), Hlm. 33.

penarikan tunai tersebut di ATM – ATM terdekat milik bank yang ingin dituju, sehingga para nasabah tak perlu datang langsung ke bank serta membawa buku tabungan dan menunggu giliran untuk melakukan transaksi tarik tunai. Selain itu, masih banyak lagi transaksi-transaksi disektor perbankan yang dapat dilakukan secara online melalui fitur-fitur Mobile Banking dan lain sebagainya yang dimiliki bank-bank yang ingin dituju, seperti halnya cek saldo, transfer kesemua bank, cek mutasi rekening, ganti PIN, pembayaran berbagai macam tagihan, pembayaran pendidikan, permbayaran BPJS, pembelian pulsa ataupun paket data, transaksi dompet digital dan masih banyak lagi lainnya.

Dengan teknologi perbankan yang canggih para nasabah mudah melakukan aktivitas bisnisnya¹⁰ kapan saja dan dimana saja.

5. Bidang Teknologi Bisnis

Bisnis pada abad infpormasi harus bersaing dalam pasar yang penuh tantangan, dengan perubahan yang cepat, kompleks , global, sangat kompetitif dan terfokus pada pelanggan.¹¹ Sementara lingkungan bisnis merujuk pada kombinasi faktor sosial budaya, politik dan hukum, ekonomi, ekologi dan teknologi yang mempengaruhi aktivitas-aktivitas bisnis.

6. Bidang Teknologi Penataan Kota

Smart city atau kota pintar merupakan pengembanga dari visi perkotaan yang di integrasikan dengan berbagai teknologi informasi dan komunikasi sebagai solusi dari pengintegarsian berbagai aset kota, seperti pusat informasi kota, sekolah, pustakaan, transpotasi, rumah sakit, unit pengelolaan listrik , unit pengairan, unit pengolahan sampah, unit satuan pengecek hukum dan berbagai pelayanan masyarakat lainnya.

1.3.Manfaat Teknologi

Ada beberapa manfaat teknologi dalam berbagi macam bidang, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teknologi Dalam Bidang Bisnis

Orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis tentu akan memperoleh banyak keuntungan, salah satunya adalah dari kenaikan laba. Hal ini dirasakan oleh seluruh pebisnis, salah satunya adlah para pebisnis yang memiliki bisnis online. Dengan hanya bermodalkan gadget dan jaringan WIFI / kuota internet, para pebisnis online

¹⁰ Stephen Liestyo, *Nasabah dan Bank : Optimalisasi Fasilitas Perbankan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2005), Hlm. 39

¹¹ M. Suyanto, *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Andi, 2005), Hlm. 3

tersebut dapat memulai dan menjalankan bisnisnya dari mana saja, salah satunya yaitu dari rumah. Hal ini tentu saja mampu menghemat biaya dan juga dapat menekan biaya operasional.

2. Manfaat Teknologi Dalam Bidang Perbankan

Dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi pada sektor perbankan saat ini, sehingga dapat memudahkan para nasabahnya dalam setiap melakukan transaksi di bank yang mereka inginkan. Karena pada saat ini telah ada beberapa transaksi disektor perbankan yang dapat dilakukan secara online dan darimana saja, salah satunya adalah penyetoran dan pengambilan uang disektor perbankan yang kini dapat dilakukan secara online. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut maka dapat memudahkan para nasabahnya untuk melakukan kegiatan penyetoran dan pengambilan uang tersebut secara online yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga para nasabah tidak perlu repot-repot lagi untuk datang langsung ke bank yang ingin dituju pada saat jam kerja hanya karena untuk melakukan penyetoran serta pengambilan uang saja, sehingga dapat lebih mengefisienkan waktu yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

Selain itu, banyak sekali ATM dan mesin setor tunai yang dapat kita jumpai disetiap sudut kota dengan layanan 24 jam. Hal ini tentu saja sangat membantu para nasabah yang ingin melakukan transaksi tersebut kapan saja dan dimana saja, selain menghemat waktu hal ini juga dapat menghemat biaya.

3. Manfaat Teknologi Dalam Bidang Telekomunikasi

Dengan adanya teknologi informasi kita dapat menggunakan beragam teknologi yang ada pada saat ini dengan lebih mudah. Selain itu, kita juga dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan lebih mudah dan lebih cepat lagi bahkan sampai ke mancanegara. Kemudahan-kemudahan dalam berkomunikasi tersebut dapat kita rasakan hingga sekarang salah satunya melalui media-media sosial yang kita miliki di gadget kita.

4. Manfaat Teknologi Dalam Bidang Pendidikan

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang hingga saat ini, kita dapat memanfaatkan media internet untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang mungkin tidak kita dapatkan di dalam sebuah buku. Selain itu, pada saat ini pendaftaran sekolah serta pendaftar kuliah yang dahulunya harus datang langsung ke sekolah ataupun ke universitas yang ingin dituju maka sekarang telah dapat dilakukan melalui pendaftaran secara online dan pada saat registrasi

pun sudah dapat dilakukan secara online online pula. Dan pada masa pandemi covid-19 yang mengharuskan semua kalangan dan semua sektor untuk menjaga jarak dan hampir semua kegiatan dilakukan dari rumah (WFH), hampir semua sekolah dan universitas melakukan kegiatan pembelajarannya melalui online / daring dan dilakukan dari rumah masing-masing.

5. Manfaat Teknologi Dalam Bidang Kesehatan

Manfaat teknologi lainnya yang dapat kita rasakan adalah dalam bidang kesehatan. Teknologi dapat dikatakan sangat berpengaruh dalam bidang kesehatan dikarenakan dengan adanya perkembangan teknologi saat ini maka berdampak pula pada perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas maka sekarang pencatatan juga dilakukan menggunakan komputer dan lalu di arsipkan dalam sebuah dokumen. Hal ini sangat memudahkan para petugas guna mengetahui rekam medis para pasien dengan cepat dan tepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data kelainan pasien yang didapat dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil dari laboratorium.

1.4. Pengertian Teknologi Digital

Teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan yang dilakukan menggunakan komputer / digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputeralisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer.

Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem perhitungan yang sangat cepat dalam memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan pada kualitas dan efisiensi kapasitas data yang dibuat dan dikirimkan seperti, gambar menjadi semakin lebih jelas karena kualitas yang lebih baik, kapasitas menjadi lebih efisien dan proses pengiriman yang semakin cepat.

Teknologi digital menggunakan sistem bit dan byte untuk menyimpan data dan memproses data, sistem digital memperkerjakan sebagian besar switch listrik mikroskopis hanya memiliki dua keadaan atau nilai (Biner 0 dan 1). Dari sistem ini dihasilkan berbagai perkembangan yang sangat signifikan seperti bidang komunikasi, transformasi informasi, pengolahan data, keamanan data dan penanganan kegiatan yang semakin kompleks. Komunikasi telah berkembang pesat dengan adanya penemuan jaringan komunikasi data yang semakin maju mulai dari jaringan HSDPA, 2G, 3G, 4G bahkan sudah mulai masuk ke teknologi tinggi yaitu 5G. Kecepatan perkembangan teknologi jaringan ini begitu

singkat dan melampaui batas kecepatan perkembangan hardware, sehingga banyak konsumen teknologi informasi yang selalu mengikuti perkembangan ini agar dapat menikmatinya. Disaat masih menikmati jaringan 4G telah ada jaringan yang lebih cepat dan lebih besar kapasitasnya.

Teknologi digital akan terus berkembang pada masa yang akan datang. Perkembangan teknologi ini dipengaruhi tiga hal yaitu, transisi digital, konvergensi jaringan dan infrastruktur digital. Konvergensi jaringan adalah efisiensi dan efektifitas jaringan komunikasi yang dapat digunakan seperti telepon, video dan komunikasi baik dirumah maupun pada perusahaan. Semakin tingginya kebutuhan konvergensi jaringan ini maka teknologi akan berubah mengarah ke kebutuhan tersebut.

Era transisi atau era perpindahan teknologi, dari teknologi sebelumnya ke teknologi digital, baik dari sisi produsen maupun konsumen telah beralih memilih teknologi yang lebih simpel yaitu teknologi digital. Khusus untuk konvergensi jaringan maka akan mengacu pada kecenderungan gaya hidup. Maka dengan kecenderungan tersebut, produsen produk digital akan mengarahkan peluang bisnisnya ke arah tersebut. Produk dan teknologi akan mengikuti perkembangan gaya hidup masyarakat dengan teknologi di era digital seperti saat ini. Produsen produk-produk digital harus mampu memberikan solusi yang komprehensif pada era konvergensi jaringan tersebut.

Pesatnya perkembangan teknologi dan gaya hidup di masyarakat membawa perubahan yang sangat pesat pula akan kebutuhan teknologi, saat ini teknologi digital merupakan pilihan yang paling utama yang dipilih oleh masyarakat.

1.5. Transformasi Digital

Digital transformation atau transformasi digital adalah sebuah perubahan cara penanganan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas. Beberapa bidang yang telah melakukan transformasi digital ini antara lain seperti, pendidikan dengan e-learning, bisnis dengan e-bisnis, perbankan dengan e-banking, pemerintahan dengan e-government dan masih banyak lagi lainnya. Inti dari semua itu ialah peningkatan efisiensi dan efektivitas pekerjaan dan berkas pendukungnya yang menggunakan database, dan paperless merupakan tujuan utamanya. Semua bukti transaksi yang berupa dokumen telah tergantikan dengan database sehingga jauh lebih simple, fleksible serta dapat diakses setiap saat.

Perubahan dari transformasi teknologi digital ini pada akhirnya akan membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi setiap individu ataupun bagi suatu perusahaan yang berkaitan dengan proses bisnis tersebut. Salah satu dampak positifnya ialah, dalam

bisnis dengan adanya transformasi teknologi digital ini maka akan memberikan kemudahan bagi para pelanggannya untuk memesan / membeli suatu produk dengan lebih mudah dan lebih murah, para pelanggan tidak perlu lagi datang dan bertransaksi secara langsung ketoko yang diinginkan namun bisa melakukan transaksi tersebut secara online. Semua transaksi tersebut dapat dilakukan melalui online dengan menggunakan berbagai media teknologi informasi, mulai dari proses pemesanan, proses pembayaran, proses konfirmasi sampai proses pengecekan barang saat proses pengiriman sampai barang sampai ditangan konsumen, semuanya dapat dilakukan melalui online. Selain itu, efek lainnya adalah harga produk yang akan semakin murah, hal ini di karenakan proses pemasaran dan administrasinya tidak membutuhkan biaya yang besar. Lalu salah satu dampak negatifnya ialah seperti, bagi para pebisnis yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara tradisional makan akan mengalami kerugian karena para pelanggan akan lebih memilih untuk beralih menggunakan transaksi digital yang jauh lebih mudah, murah, cepat dan lebih efisien waktu.

1.6. Kemudahan Sistem Digital

Dengan adanya perkembangan teknologi digital pada saat ini, maka efisiensi dan efektifitas tersebut telah terbukti dilingkungan masyarakat dan telah dirasakan oleh masyarakat banyak. Berikut adalah beberapa kemudahan-kemudahan yang dapat kita rasakan pada saat ini antara lain, yaitu :

1. Transformasi Digital Di Dunia E-Commerce

Dunia e-commerce adalah salah satu yang sangat terpengaruh dengan adanya transformasi digital pada saat ini, dikarenakan semua perusahaan e-commerce selalu berhubungan langsung dengan dunia digital. Dan pada saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang juga mengembangkan sayapnya didunia e-commerce dikarenakan pada saat ini dunia e-commerce tengah sangat berkembang dan jarang di dunia e-commerce yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar, hal tersebut dikarenakan besarnya minat belanja dan daya beli masyarakat. Contoh e-commerce antara lain yaitu, shopee, tokopedia, lazada, bukalapak dan lain sebagainya.

2. Transformasi Digital Di Dunia Perbankan

Pada saat ini banyak layanan perbankan yang menggunakan teknologi digital / digital transformation sebagai pendekatan pihak perbankan kepada para nasabahnya/ kosumen. Salah pendekatan tersebut adalah dengan adanya aplikasi *mobile banking* yang dapat mempermudah transaksi keuangan bagi para

nasabahnya. Selain itu, dengan adanya aplikasi pendukung lainnya yang dapat mempermudah kegiatan perbankan bagi para nasabahnya. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi digital disektor perbankan pada saat ini maka bertransaksi menjadi semakin jauh lebih mudah, murah dan aman serta dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terpengaruh ruang dan waktu.

1.7.Dampak Transformasi Digital

Di era digitalisasi yang terus berkembang pesat seperti saat ini, hampir seluruh kegiatan masyarakat pada saat ini menggunakan sistem digital / online. Selain untuk membantu masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari, sistem digital juga dirasakan lebih mudah, murah, efektif dan efisien waktu oleh masyarakat. Namun, dibalik itu semua tentu saja pasti ada dampak yang mengiringi perkembangan teknologi digital tersebut. Berikut ini adalah beberapa dampak dari trans`formasi digitalisasi tersebut antara lain, yaitu :

1. Kejahatan sistem digital
2. Perilaku individu sistem digital
3. Perilaku perusahaan sistem digital

B. Revolusi Industri 4.0

1.1. Pengertian Revolusi Industri 4.0

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revolusi industri terdiri dari dua kata yaitu revolusi dan industri. Revolusi sendiri memiliki arti perubahan yang bersifat sangat cepat, sedangkan industri sendiri memiliki arti usaha pelaksanaan proses produksi. Apabila ditarik benang merahnya, maka pengertian dari revolusi industri adalah suatu perubahanyang berlangsung cepat dalam pelaksanaan proses produksi dimana yang semula pekerjaan proses produksi itu dikerjakan oleh manusia digantikan oleh mesin, sedangkan barang yang diproduksi mempunyai nilai tambah (value added) yang komersial.

Istilah revolusi industri 4.0 merupakan istilah dari suatu ide yang didasari adanya revolusi industri yang ke empat kalinya. Istilah industri ini muncul di Negara Jerman tahun 2011 ketika diadakannya Hannover Fair. Dimana negara Jerman tersebut berkepentingan besar terhadap hal ini. Dengan hal tersebut Jerman bertujuan untuk mampu senantiasa menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur. Revolusi industri ini merupakan salah satu bagian dari kebijakan rencana pembangunannya, yang mana kebijakan pembangunan tersebut disebut dengan *High-Tech Strategy 2020*. Beberapa negara pun juga ikut andil dalam mewujudkan konsep revolusi ini. Meskipun dengan sebutan atau istilah yang berbeda-beda namun tujuannya tetaplah sama yaitu untuk mampu meningkatkan daya

saing industri dalam tiap-tiap negara dalam menghadapi pasar global yang begitu dinamis. Di negara lain revolusi ini memiliki sebutan atau istilah yang berbeda-beda diantaranya ada yang menyebutkan dengan *Smart Factories*, *Industrial Internet of Things*, *Smart Industry*, *advancedmanufacturing*.¹²

Dalam referensi lain, pada Abad 21 atau yang biasa disebut dengan era 4.0 ini dikenal dengan masa pengetahuan. Yang mana dalam era ini seluruh alternatif upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pada pengetahuan. Baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, masyarakat maupun dalam bidang industri. Hal ini dipicu oleh lahirnya sains dan teknologi komputer. Selain itu, di era ini juga muncul beberapa dampak diantaranya yaitu informasi tersedia dimana saja yang dapat diakses kapan saja, komputasi yang semakin cepat, otomasi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin serta komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.¹³

Dalam sebuah jurnal juga dipaparkan beberapa pendapat mengenai revolusi 4.0 ini, beberapa diantaranya yaitu menurut Angela Merkel yang berpendapat bahwasannya revolusi 4.0 ini merupakan perubahan secara menyeluruh dari seluruh aspek dalam produksi industri melalui adanya penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Sedangkan menurut Schlechtendahl, menjelaskan bahwasannya revolusi 4.0 ini merupakan era yang menekankan unsur kecepatan dari ketersediaannya informasi yang mana dalam suatu lingkungan industri selalu mampu terhubung dan berbagi informasi satu dengan yang lain.¹⁴

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya revolusi industri 4.0 ini merupakan suatu era perubahan dari berbagai sektor kehidupan yang ditandai oleh adanya perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi yang mempercepat tersebarnya suatu informasi atau lebih dikenal dengan istilah era digitalisasi.

1.2. Sejarah Revolusi Industri 4.0

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Richard Mengko, yang mengambil sumber dari A.T. Kaerney, mengungkapkan sejarah revolusi industri sampai akhirnya menyentuh generasi keempat. Berikut ini empat tahap revolusi industri, yaitu :

¹² Hoedi Prasetyo, Wahyudi Sutopo, *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset*, Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1, 2008, Hlm. 17-18.

¹³ Etistika Yuni Wijaya, Dewi Agus Sudjimat, Amat Nyoto, *Transformasi Pendidikan Abad 24 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global*, Universitas Kejuruan Malang, Vol. 1, 2016, Hlm. 264

¹⁴ Hoedi Prasetyo, Wahyudi Sutopo, *Industri 4.0 : Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset*, Hlm. 19.

1. Akhir Abad Ke- 18

Revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir abad ke-18. Ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Pada saat itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Banyak orang-orang mengaggur tapi produksi diyakini berlipat ganda.

2. Awal Abad Ke- 20

Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 kala itu ada pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat pada tahun 1870.

3. Awal 1970

Pada awal tahun 1970 ditengarai sebagai perdana kemunculan revolusi industri 3.0. dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi. Debut revolusi industri generasi ketiga ini ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC) yakni modem084-969. Sistem otomatis berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh manusia . dampaknya memang biaya produksi menjadi lebih murah.

4. Awal 2018

Pada awal tahun 2018 merupakan zaman revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sistem *cyber-physical*. Dunia industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua telah ada dimana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama *internet of things* (IoT).

1.3. Karakteristik Revolusi Industri 4.0

Menurut Kinzel (2016) karakteristik revolusi industri 4.0 adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi-teknologi terbaru. Berikut ini adalah karakteristik revolusi industri 4.0 antara lain, yaitu¹⁵ :

1. Sistem siber fisik (*cyber-physical system*).
2. Teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*)
3. Jaringan komunikasi (*network communications*).

¹⁵ Rahman Fuzan, *Karakteristik Model Dan Analisa Peluang-Tantangan Industri 4.0*, Volume 04, Nomor 1, Jurnal Teknik Informatika Politeknik Hasnur, 2018, Hlm. 2.

4. Big Data dan Cloud Computing.
5. Peningkatan kemampuan peralatan untuk interaksi dan kooperasi manusia-komputer (*human-computer*).
6. Pemodelan (*modeling*), visualisasi (*virtualization*) dan simulasi (*simulation*).

1.4. Peluang Revolusi Industri 4.0

Perubahan dalam manufaktur ini dikatakan akan menghasilkan perubahan pada berbagai macam manufaktur, produk dan bisnis (Kinzel, 2016). Industri 4.0 memiliki potensi peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara individual, fleksibilitas produksi, optimalisasi pengambilan keputusan, efisiensi dan produktivitas sumber daya, perubahan tempat kerja secara demografik, tenaga kerja dan dunia kerja yang seimbang dan ekonomi kompetitif dengan upah yang tinggi (Kagermann, 2013). Berikut ini adalah peluang-peluang revolusi industri 4.0 antara lain, sebagai berikut :

1. Kustomisasi Massal (*Mass Customization*).
2. Fleksibel Produksi.
3. Meningkatkan Kecepatan Produksi.
4. Kualitas Produk Yang Lebih Baik Dan Mengurangi Rata-Rata Kerusakan.
5. Mengoptimalkan Efisiensi Dan Pengendalian Data Untuk Pengembalian Keputusan.
6. Kedekatan Yang Lebih Baik Terhadap Pelanggan.
7. Metode Baru Dalam Menciptakan Nilai.
8. Meningkatkan Kehidupan Kerja.

1.5. Tantangan Revolusi Industri 4.0

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam revolusi industri 4.0. Tantangan-tantangan tersebut antara lain, sebagai berikut :

1. Perubahan Paradigma Bisnis.
2. Keamanan Dan Pengamanan.
3. Persoalan Hukum Dan IP.
4. Standarisasi.
5. Desain Dan Organisasi Pekerjaan.
6. Peningkatan Dan Pengembangan Keterampilan Para Pekerja.
7. Hambatan Untuk Perubahan.

C. Tenaga Kerja

1.1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau orang yang dapat mengerjakan sesuatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga menjelaskan bahwa pekerja melakukan sesuatu dalam bidang yang dikuasainya guna menghasilkan barang atau jasa untuk meningkatkan produktivitas baik dalam jangka waktu panjang guna meningkatkan tingkat output pada periode tertentu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada BAB I Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah “ *setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.*”¹⁶

Menurut DR Payaman J. Simanjuntak dalam bukunya “ Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia ”, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut DR Payaman J. Simanjuntak hanya dibedakan oleh batasan umur saja. ¹⁷

Selain itu, Sumarsono juga menyatakan pendapat tentang tenaga kerja. Yang dimana tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk berkerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang berkerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk berkerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menggur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁸

Dari beberapa penjelasan tentang tenaga kerja seperti yang telah dijelaskan dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga kerja adalah seorang individu yang sedang mencari atau telah melakukan suatu pekerjaan yang memiliki potensi atau kemampuan untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa. Dan orang tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditentukan, dan bertujuan untuk memperoleh hasil yang berupa upah guna mencukupi kebutuhan hidup

¹⁶ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

¹⁷ Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Citra, 199), Hal. 18.

¹⁸ Devi Lestyasari, *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*, (Surabaya : Fakultas Ekonomi Unnesa)

sehari-hari dari seorang pekerja tersebut. Dan tentang tenaga kerja juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan republik indonesia.

1.2.Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenagakerjaan yang tersusun berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berikut ini adalah klasifikasi-klasifikasi tenaga kerja antara lain, yaitu :

1. Berdasarkan Penduduknya

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

b. Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu atau tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk diluar usia, yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia diatas 64 tahun. Contoh dari kelompok ini adalah seperti halnya para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan para anak-anak.

2. Berdasarkan Batas Kerja

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun yang telah mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia 10 tahun keatas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Contoh dari kelompok ini antara lain yaitu, pelajar, mahasiswa, para ibu rumah tangga, orang berkebutuhan khusus (cacat) dan para pengangguran sukarela.

3. Berdasarkan Kualitasnya

a. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam suatu bidang tertentu. Keterampilan tersebut didapatkan melalui berbagai cara seperti halnya dengan cara bersekolah atau pendidikan

formal dan pendidikan nonformal lainnya. Contoh dari kelompok ini antara lain yaitu, dokter, guru, dosen dan lain sebagainya.

b. Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contoh dari kelompok ini antara lain yaitu, apoteker, ahli bedah, mekanik dan lain sebagainya.

c. Tenaga Kerja Tidak Terdidik Dan Tidak Terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh dari kelompok ini antara lain yaitu, kuli, buruh angkut, asisten rumah tangga dan lain sebagainya.

1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja antara lain, yaitu :

1. Tingkat Upah

Upah merupakan sebuah penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan. Berfungsi untuk keberlangsungan hidup yang layak bagi seorang penerima kerja (tenaga kerja) tersebut. Dan pembayaran upah tersebut dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian dan persetujuan yang telah disetujui diawal. Pemberian upah tersebut telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan, dan proses pemberian upah tersebut telah ditetapkan sesuai dengan dasar perjanjian dan persetujuan yang telah dilakukan diawal antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Ehrenberg menyatakan bahwa apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, hal tersebut berarti akan menyebabkan menimbulkan sebuah pengangguran baru. Akan tetapi sebaliknya, jika menurunnya suatu tingkat upah rata-rata maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan yang terbalik dengan tingkat upah.

Selain itu, Haryo Kuncoro (2001) juga menyatakan pendapat yang serupa, dimana kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah tersebut. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dibandingkan input lain. Situasi ini akhirnya akan mendorong para pemberi kerja (pengusaha) akan mengurangi penggunaan tenaga kerja yang dimilikinya dikarenakan tenaga kerja tersebut relatif lebih mahal dibandingkan dengan input-input lainnya yang harganya relatif lebih murah. Hal tersebut dilakukan guna mempertahankan suatu unit usaha / perusahaan yang dimilikinya, selain itu guna mempertahankan keuntungan yang dimilikinya agar tetap memiliki keuntungan yang maksimum. ¹⁹

2. Nilai Produksi

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang merupakan hasil akhir dari proses produksi pada suatu unit usaha / perusahaan yang selanjutnya hasilnya akan dijual dan sampai ke tangan konsumen. Apabila permintaan terhadap hasil produksi dari suatu unit usaha / perusahaan meningkat, maka produsen akan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Oleh karena itu, pada keadaan ini produsen cenderung akan menambah penggunaan tenaga kerja. Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil produksi antara lain, naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi.²⁰

Jika nilai output dari suatu daerah mengalami peningkatan maka akan diperkirakan hasil produksi dari suatu produk barang atau jasa juga akan mengalami peningkatan hasil produksi. Hal tersebut dikarenakan, bertambahnya jumlah unit usaha atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sama. Semakin bertambahnya suatu unit usaha atau perusahaan tersebut, maka para pemilik usaha (pengusaha) akan membutuhkan sejumlah biaya tambahan untuk mengembangkan usaha-usahanya tersebut. Selain itu, para pemilik unit usaha (pengusaha) tersebut juga membutuhkan tenaga kerja tambahan guna melaksanakan serta mengoptimalkan proses produksi barang atau jasa dari unit usaha / perusahaan yang dimilikinya.

¹⁹ Kuncoro Haryo, 2001. " *Sistem Bagi Hasil dan Stabilitas Penyerapan Tenaga Kerja*", Media Ekonomi, Volume 7, Nomor 2 Hal 165 – 168.

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008), cet. 2, Hlm. 2.

3. Nilai Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.²¹ Sedangkan menurut Dumairy (1998 : 81) investasi adalah penambahan barang modal secara netopositif. Seseorang yang membeli barang modal tetapi ditujukan untuk mengganti barang modal yang habis dalam proses produksi bukanlah merupakan investasi, tetapi disebut dengan pembelian barang modal untuk mengganti (replacement)²²

1.4. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada BAB 10 Paragraf 5 Pasal 86 yang menyatakan bahwa:

- 1). *setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :*
 - a. *Keselamatan dan kesehatan kerja*
 - b. *Moral dan kesusilaan*
 - c. *Perlakuan yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama*
- 2). *Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.*
- 3). *Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*²³

Menurut Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya.²⁴ Berikut ini adalah hak-hak bagi para tenaga kerja (pekerja), yaitu :

²¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), Edisi 2, Hlm. 107

²² Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2002), Hlm. 81.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²⁴ Darwin Prinst, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra, 2000), Hlm. 213.

1. Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 sampai dengan Pasal 97 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah).
2. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).
3. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).
4. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).
5. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek).
6. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja (Pasal 104 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).
7. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).
8. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).
9. Hak atas suatu pembayaran tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai sedikitnya enam bulan terhitung dari saat ia berhak atas istirahat tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal bila hubungan kerja diputuskan oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh buruh, atau oleh buruh karena alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh majikan (Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003)
10. Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan (Pasal 6 sampai dengan Pasal 115 Undang- Undang No. 2 Tahun 2004).

Dari sudut tenaga kerja, mempunyai hak serta kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan. Berikut ini adalah kewajiban tenaga kerja antara lain, yaitu :

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
2. Memakai alat keselamatan kerja
3. Memenuhi dan menaati persyaratan-persyaratan keselamatan kerja ditempat kerja

Ada pula hak-hak dari tenaga kerja antara lain, yaitu :

1. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ditempat kerja yang bersangkutan.
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.²⁵

1.5. Tenaga Kerja Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Sebagian ahli ekonomi membagi tenaga kerja kedalam dua kelompok yaitu, tenaga kerja produktif dan tenaga kerja tidak produktif. Tenaga kerja produktif ialah jika ia pekerja yang dapat menambah nilai material, seperti pekerja disektor pertanian dan manufaktur. Sedangkan, tenaga kerja tidak produktif adalah pekerja yang tidak menambah nilai material.

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi di dasari konsep istikhaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia.

Sedangkan, tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan buruh diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari

²⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm. 133 – 136.

itu Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal / kerja, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nahl (16) Ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ”.²⁶

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal.²⁷ Oleh karena itu, tenaga kerja memiliki posisi secara komparatif lebih lemah, islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Sebenarnya hak tenaga kerja adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya.

Bentuk kerja yang disyariatkan dalam islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiridan bermanfaat antara lain, yaitu :

- a. Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun).²⁸ HR Imam Bukhari dari Umar Bin Khattab “siapa saja yang menhidupkan tanah mati, maka tanah (mati yang dihidupkan) tersebut telah miliknya”.
- b. Menggali kandungan bumi
- c. Berburu
- d. Makelar (*samsarah*)
- e. Perseroan antara harta dengan tenaga (*mudharabah*)
- f. Mengairi lahan pertanian (*musaqat*)
- g. Kontrak tenaga kerja (*ijarah*)

²⁶ <https://tafsirweb.com/4445-surat-an-nahl-ayat-97.html>

²⁷ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 182.

²⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2009), Hlm. 227-229.

D. Permintaan Tenaga kerja

1.1. Pengertian Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1985) teori permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu perusahaan akan memperkerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu.

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang akan diperkerjakan oleh para pengusaha. Permintaan tenaga kerja yaitu sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh seorang pengusaha di setiap kemungkinan tingkat upah dalam kurun waktu tertentu.

Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan atas suatu barang produksi sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk produksinya jika permintaan akan barang produksi meningkat. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja disebut sebagai *derived demand* atau permintaan turunan. Untuk memperthankan tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu unit usaha / perusahaan, maka unit usaha/perusahaan tersebut harus menjaga permintaan masyarakat atas barang yang diproduksi agar stabil atau bahkan lebih meningkat. Dalam menjaga stabilitas permintaan atas barang produksi, maka perusahaan dapat melakukan berbagai kegiatan seperti halnya melakukan ekspor dan impor dan lain sebagainya, selain itu perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing baik pada pasar dalam negeri maupun pada pasar luar negeri. Dengan demikian diharapkan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja dapat dipertahankan pula.

Permintaan tenaga kerja memainkan peran penting dalam penilaian kebijakan. Permintaan tenaga kerja memiliki karakter individu dipasar tenaga kerja, tenaga kerja dibeli bukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, melainkan dibeli karena tugas tertentu untuk dipenuhi dan memiliki layanan yang diberikan (Abdurakhmanov & Zokirova, 2013). Tingkat permintaan tenaga kerja oleh individu perusahaan yang dapat dimaksimalkan keuntungan terjadi pada saat nilai produktivitas tenaga kerja sama dengan biaya marginal tenaga kerja (Santoso, 2012).

Miler and Meiners (1993), mempunyai pendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh marjinal produk. Nilai marjinal produk (VMP) adalah perkalian antara produk fisik marjinal dengan harga produk yang berkaitan. Produk fisik marjinal yaitu kenaikan total produk fisik yang berasal dari penambahan satu unit input variabel atau tenaga kerja . perusahaan beroperasi pada pasar kompetitif sempurna maka besarnya **VMP** merupakan perkalian antara **MPP** × **P** sama dengan

harga input produk yang bersangkutan yaitu **PN**. Besarnya **VMP = P** diperoleh dari kombinasi input optimal atau biaya minimal dalam proses produksi akan terjadi bila kurva *isoquant* menjadi *tangens* terhadap *isocost*. Bila sudut garais pada *isoquant* sama dengan w/r , namun besarnya sudut disetiap titik pada *isoquant* sama dengan **MPPI/MPPK**, maka menjadi :

$$w/r = MPPL/MPPK$$

Keterangan :

r : tingkat bunga implisit yang bersumber dari modal

w : tingkat upah per unit

Persamaan diatas secara umum diperluas menjadi :

$$MPPx/Px = MPPY / PY$$

Artinya, meminimalkan biaya input serta memaksimalkan output dengan penggunaan input mensyaratkan penggunaan kombinasi sehingga **MPP**, setiap harganya sama untuk setiap input. Variabel x akan menaikkan biaya produksi sebanyak **Px**, hal tersebut juga akan memperbesar volume produk sebanyak **MPPx** itu berarti **Rasio Px/MPPx** adalah tingkat perubahan total biaya perusahaan bagi setiap perubahan output fisiknya secara definitif dengan begitu memiliki kesamaan dengan biaya marginal (*Marginal Cost, MC*). Maka akan berubah menjadi :

$$MPPx/Px = MPPY/PY = MFPN/PN = 1/MC$$

Jika perusahaan beroperasi dalam pasar kompetitif sempurna maka persamaan dirubah menjadi :

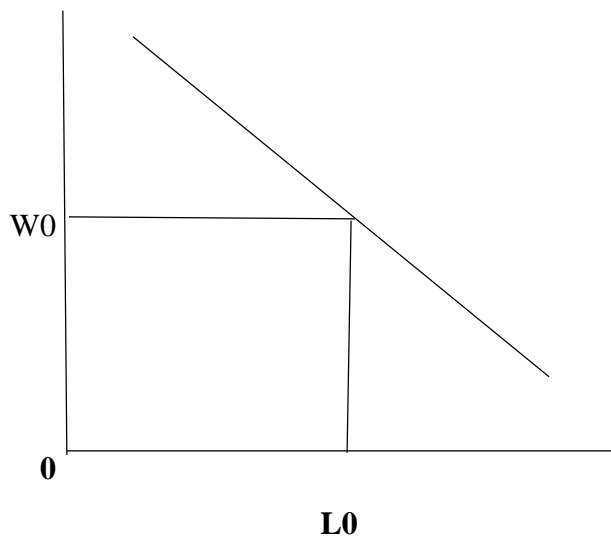
$$MPPx/Px = MPPY/PY = MPPN/PN = 1/MC - 1/MR = 1/P$$

Persamaan diatas dapat kita ketahui bahwa :

$$MPPx/Px = 1/MR = 1/P, \text{ sehingga } MPPx \cdot xP = Px$$

Kurva **VMP** dalam tenaga kerja merupakan kurva tenaga kerja untuk semua input. Maka kurva **VMP** untuk tenaga kerja merupakan kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek dari perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. Perusahaan yang bergerak dalam pasar kompetisi sempurna, harga outputnya akan selalu konstan dari kuantitas output yang dijualnya. Harga input juga

dapat dikatakan konstan. Penawarannya elastis sempurna untuk semua perusahaan. Dengan demikian kuantitas tenaga kerja yang memaksimalkan laba perusahaan terletak pada titik perpotongan antara garis upah (Tingkat upah / uang berlaku untuk pekerja terampil yang dibutuhkan perusahaan) dan kurva **VMP** perusahaan.

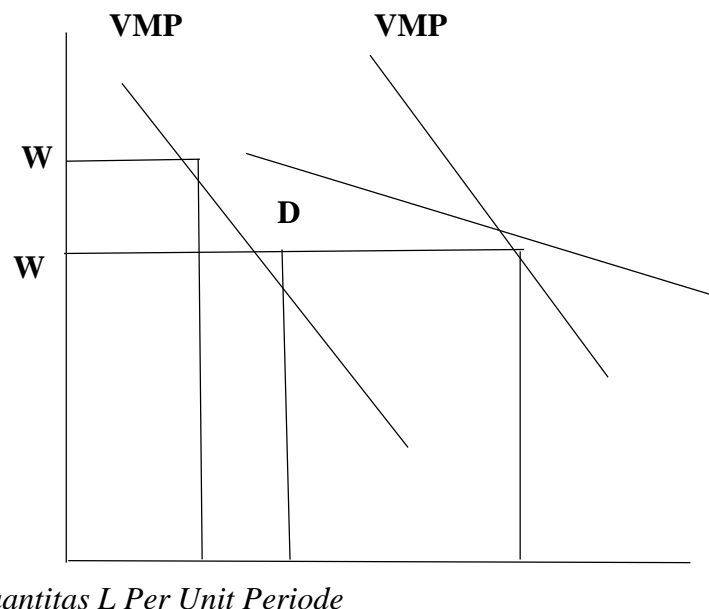


Gambar 2.4 Kurva Kuantitas Tenaga Kerja Yang Memaksimumkan Laba

Jika upah perunit pekerja kualitasnya stagnan atau konstan adalah **W0**, maka kuantitas pekerja yang optimal adalah **L0**. Garis horizontal yang bertolak dari **W0** adalah kurva penawaran tenaga kerja pada setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif sempurna. Suatu perusahaan akan menggunakan tenaga kerja tambahan jika **MPPi** lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja tambahan. Biaya tenaga kerja tambahan ditentukan oleh upah riil yang dihitung sebagai upah nominal, upah riil untuk mengukur jumlah output riil yang akan dibayar perusahaan untuk setiap karyawannya dengan memberi upah kepada satu karyawannya akan menghasilkan kenaikan output untuk **MPPL** dan biaya pada perusahaan. Dalam upah riil perusahaan akan mengupahkan tenaga kerja tambahan selama **MPPL** melebihi upah riil. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan semakin turun **MPPi** dikarenakan nilai **MPPi** mengikuti hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marjinal menjadi lebih kecil juga berpengaruh terhadap **MPPi**.

Jika harga dan tingkat upah kerja naik, maka kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun. Dengan adanya oleh kenaikan arus upah yang berpotongan dengan kurva **VMP** dalam kuantitas tenaga kerja yang sedikit. Produk marginal dari input modal atau **MPPR** akan menurun karena faktor berkurangnya pekerja, karena setiap unit modal dikerjakan sedikit karyawan. Seperti pada kasus semua mesin dioperasikan oleh satu orang, produk fisik marginal mesin tersebut akan menurun dibandingkan saat sebelumnya, pada saat mesin itu operasikan oleh beberapa orang. Jika hanya ada satu pekerja, tidak dapat bergantian dengan yang lainnya dan hasilnya pun juga akan lebih sedikit.

Upah VMP L



Kuantitas L Per Unit Periode

Gambar 2. 5 Kurva Kuantitas Tenaga Kerja Dengan Dua Input Variabel

Tingkat upah sebesar **W2** penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan yang optimal adalah **L3**. Kemudian upah naik menjadi **W1**, laju penyerapan tenaga kerja ke **L2** yang mana garis upah horizontal yang berpotongan dengan kurva **VMPi**. Kenaikan upah mengakibatkan produk fisik marginal modal menurun dan bergeser ke kiri menjadi **VMPi**, dan berpotongan dengan garis upah horizontal (kurva penawaran tenaga kerja) adalah **titik C**, tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal akan turun ke **L**. Jika **titik A** dan **C** dihubungkan akan diperoleh kurva permintaan tenaga kerja **dLdL**. Maka jumlah tenaga kerja yang dipergunakan produk marginal modal akan menurun. Setiap unit modal kini membutuhkan lebih sedikit hasil sehingga tidak dapat menyerap banyak unit tenaga kerja. **MPPR** akan menurun seiring dengan menurunnya

tenaga kerja yang diserap. Perusahaan akan merekrut setiap unit input sampai suatu titik dimana nilai produk marjinalnya sama dengan harganya.

1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja antara lain, sebagai berikut :

1. Perubahan Tingkat Upah.
2. Perubahan Permintaan Hasil Akhir Produksi Oleh Konsumen.
3. Harga Barang Modal Turun.

1.3. Kategori Permintaan Tenaga Kerja

1. Permintaan Tenaga Kerja Dalam Jangka Pendek

Pasar input tenaga kerja bersifat sempurna dan tidak sempurna. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna mempunyai karakteristik beberapa perusahaan yang meminta tenaga kerja serta banyak tenaga kerja yang menawarkan diri dalam pasar. Setiap perusahaan menerima tingkat upah pasar menjadi tingkat upah perusahaan disebut *wage taker*. Monopsonis sebagai *wage taker* memiliki kekuatan dalam menentukan sendiri tingkat upah bagi tenaga kerjanya. Pada dasarnya monopsonis hanya terdapat satu perusahaan yang meminta tenaga kerja sedangkan jumlah tenaga kerja yang menawarkan diri sangat banyak. Dapat digambarkan bahwa dalam jangka pendek, permintaan tenaga kerja pada pasar barang dan *input* yang memiliki struktur pasar persaingan sempurna akan mencapai optimal pada saat :

$$\mathbf{MPR} = \mathbf{MC}$$

$$\mathbf{P.MP} = \mathbf{W}$$

$$\mathbf{MP} = \frac{\mathbf{W}}{\mathbf{P}}$$

Persamaan $\mathbf{MP} = \frac{\mathbf{W}}{\mathbf{P}}$ akan menentukan permintaan tenaga kerja (**L**) Pada pasar barang dan *input* yang telah memiliki struktur pasar persaingan sempurna. Maka jumlah tenaga kerja optimal yang akan terjadi $\mathbf{MP} = \frac{\mathbf{W}}{\mathbf{P}}$ atau $\mathbf{MRP} = \mathbf{W}$.

2. Permintaan Tenaga Kerja Dalam Jangka Panjang

Semua input dan faktor produksi sifatnya tidak tetap atau bersifat variabel merupakan asumsi dari permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Tujuan

utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya produksi. Dinyatakan dalam suatu fungsi pada jangka panjang, yaitu :

$$Q = Q (L, K)$$

Keterangan:

Q : Output (unit)

L : Tenaga Kerja (Unit)

K : Modal (Unit)

E. Perbankan Syariah

1.1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Prancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Istilah ini digunakan sebab dalam realita keseharian bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin dimasa yang akan datang dilaksanakan diatas meja. Selain itu, dalam istilah ini peti / lemari dan bangku tersebut juga diibaratkan untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial yaitu, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*) dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).²⁹

Dalam bahasa Arab, bank dapat disebut dengan *mashrof* yang memiliki arti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau saling untuk melakukan muamalat.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada BAB I Pasal 1 menyatakan bahwa “ *Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam*

²⁹ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alfabeta, 2006), cet. 4, Hlm. 2.

³⁰ A. Djazuli dan Yarli Yanuar, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2001), Hlm. 53

³¹ Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang : CV. Widya Karya), Hlm. 75.

melaksanakan kegiatan usahanya”. Dan dijelaskan pula dalam Pasal 7 bahwa “ *Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* ”.³²

Edy wibowo dalam bukanya juga menyatakan bahwa, bank syariah atau bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist.³³

Sutan Remy Sjahdeini juga menyatakan bahwa, Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.³⁴

Dari beberapa penjabaran tentang pengertian bank syariah seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, perbankan syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatannya transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist.

1.2. Dasar Hukum Bank Syariah

Didalam mengoperasionalkan bank syariah, dasar hukum yang pertama adalah Al-Qur’an dan Hadist. Beberapa ayat didalam Al-Qur’an sebagai dasar operasional bank syariah, ayat-ayat tersebut antara lain adalah ayat-ayat yang melarang transaksi riba (QS. Al-Baqarah : 275), dan larangan memakan harta orang lain secara batil (QS. An-Nisa : 29) serta hadist-hadist Rasulullah yang senada.

Selain Al-Qur’an dan Hadist, maka berdasarkan hukum yang menjadi landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sebelum lahirnya UU tersebut, yang menjadi landasan operasinal bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB I, Pasal 1 dan Pasal 7.

³³ Edy Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), cet. I, Hlm. 33.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti,2007), cet. 3, Hlm. 1.

Perbankan. Dalam hal diakomodirnya prinsip syariah dalam operasional bank, yakni didalam Pasal 1 angka 3 jo. angka 13 UU No. 10 Tahun 1998.³⁵

Latar belakang dikeluarkannya regulasi perbankan syariah ini adalah :³⁶

1. Dalam rangka menciptakan tujuan pembangunan nasional berupa terciptanya masyarakat adil dan dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, serta pengembangan ekonomi yang berdasarkan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Adanya kebutuhan masyarakat indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat.
3. Perbankan syariah memiliki kekhususan dibanding dengan perbankan konvensional.
4. Pengaturan mengenai perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik.

Untuk itu maka perbankan syariah dirasa perlu diatur secara khusus didalam undang-undang tersendiri. Sehingga, keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Adapun dasar pijakan keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu :

1. Pasal 20 jo, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

³⁵ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Parama Publishing, 2012), Hlm. 14.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), Hlm. 2-3.

Dengan demikian maka didalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah hendaknya memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

1.3. Visi Dan Misi Perbankan Syariah

a. Visi Perbankan Syariah

Visi perbankan syariah berbunyi “ Terwujudnya sistem perbankan yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor rill secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi rill dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.”³⁷

b. Misi Perbankan Syariah

- 1). Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan secara berkesinambungan.
- 2). Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristik.
- 3). Mempersiapkan infrastuktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah.
- 4). Mendesain kerangka en dan exit perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.³⁸

1.4.Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Berikut ini adalah prinsip-prinsip dari perbankan syariah antara lain, yaitu :

1. Prinsip Keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
2. Prinsip Keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor rill, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
3. Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan

³⁷ Dr. Neneng Nurhasanah, M.Hum. dan Panji Adam, S.Sy.,M.H., *HUKUM PERBANKAN SYARIAH KONSEP DAN REGULASI*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Cet. 1, Hlm. 10.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hlm. 10.

kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan.

4. Prinsip Universalisme (*alamiyah*), yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, rasa dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

1.5. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Pasal 4 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut Bank Syariah memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹
- 5.

Adiwarman A. Karim, juga menjelaskan secara umum bahwa bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi agama, yaitu :

1. Menerima simpanan uang.
2. Meminjamkan uang.
3. Memberikan jasa pengiriman uang.

Di dalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. Praktik- praktik seperti menerima titipan harta,

³⁹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 21 PASAL 4 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu : menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia.⁴⁰

Dalam beberapa literatur perbankan syariah dengan berbagai ragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non riba memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Fungsi Manajer Investasi.
2. Fungsi Investor.
3. Fungsi Sosial.
4. Fungsi Jasa Keuangan.

1.6. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai instansi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga memiliki tujuan-tujuan lainnya antara lain, yaitu :

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu masyarakat yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fikih dan Keuangan*, (Depok : Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada, 2017) Edisi Kelima, Cet. 5, Hlm. 18 .

3. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.⁴¹

Selain itu, Mulawarman juga menyatakan bendapatnya tentang tujuan dari bank syariah. Berikut ini adalah tujuan-tujuan dari bank syariah menurut Mulawarman, yaitu ⁴² :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis usaha / perdagangan lain yang mengandung unsur haram, dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar, antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok yang kurang mampu dan diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan garis kemiskinan), yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga

⁴¹ Edy Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, Bogor : Ghalia Indonesia cet. I, 2005, Hal. 47.

⁴² Mulawarman, Dedi Aji, *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2006), Hal. 26.

keuangan khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

1.7. Produk-Produk Perbankan Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi dalam tiga bagian besar yaitu, produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa (*service*).

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

1). Tabungan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet, giro atau lain sebagainya.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, yang artinya adalah produk ini dapat diambil kapan saja apabila nasabah membutuhkan. Dan bentuk bagi hasil yang ditawarkan oleh produk ini kepada nasabahnya yang menabung adalah bentuk bagi hasil yang kecil.

2). Deposito

Deposito menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad yang telah disetujui diawal antara nasabah penyimpan dan bank syariah / Unit Usaha Syariah (UUS) yang bersangkutan.

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

3). Giro

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa giro adalah simpanan yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet

giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek. Baisa digunakan oleh perusahaan, yayasan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, melainkan bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip operasional bank syariah telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat. Seperti dalam prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* seperti, berikut :

a). Prinsip *Wadia'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad shamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpanan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative (*overdraft*).

b). Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengamplifikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan dana atau deposit bertindak sebagai *shahinul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

2. Produk Penyaluran Dana / Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu, sebagai berikut :

- 1). Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti, *bai' murabahah*, *bai' as salam* dan *bai' istishna*.
- 2). Pembiayaan dengan prinsip sewa. Seperti, *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi tamlik*
- 3). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Seperti, *musyarakah*, *mudharabah*, *muxara'ah* dan *musaqah*.

3. Produk Jasa (*service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai jenis pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain, sebagai berikut :

1). Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing tersebut. Prinsip ini di praktikan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

2). Titipan (*Wadiah*)

Pada dasarnya, dalam akad *wadiah yad dhamanah* penerimaan simpanan hanya dapat menyimpan titipan tanpa berhak untuk menggunakannya. Ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan ataupun kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

BAB III
GAMBARAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJK)

A. Latar Belakang OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pada BAB I Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “ *Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*”

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK Ke OJK sejak 31 Desember 2012. Sedangkan, pengawasan disektor perbankan resmi beralih ke OJK sejak 31 Desember 2013. Dan Lembaga Keuangan Mikro resmi beralih ke OJK sejak tahun 2015.

B. Tujuan Pembentukan OJK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pada BAB III Pasal 4 menyatakan bahwa “ *OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan :*

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel ;*
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil ;*
dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.*

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain seperti, sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK sendiri tersebut

dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*).

C. Visi Dan Misi OJK

1. Visi OJK

Visi OJK ialah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

2. Misi OJK

Berikut ini adalah misi-misi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu :

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

D. Fungsi Dan Tugas OJK

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

2. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Pasal 6 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal
3. Kegiatan jasa keuangan disektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

E. Wewenang OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang. Berikut ini adalah wewenang-wewenang yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu :

- 1. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi :**
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa.
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Sistem dan informasi debitur. Pengujian kredit (*credit testing*) dan standar akuntansi bank.
 - d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi : manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank.
- 2. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi :**
 - a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
 - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
 - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
 - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
 - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

- 3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non- Bank) meliputi :**
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
 - d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
 - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
 - h. Memberikan dan mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya.

F. Nilai-Nilai OJK

1. Integritas

Bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

2. Profesionalisme

Berkerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

4. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

5. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*foward looking*) serta dapat berpikir diluar kebiasaan (*out of the box thinking*).

G. Asas-Asas OJK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Independensi

Asas independensi yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.

4. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan .

6. Asas Integritas

Asas integritas adalah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asa yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

H. Struktur Organisasi OJK

Struktur organisasi OJK terdiri atas :

1. Dewan Komisiner OJK

Ketua merangkap anggota :

- a. Wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota
- b. Kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota
- c. Kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota
- d. Kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota
- e. Ketua dewan audit merangkap anggota
- f. Anggota yang mendampingi edukasi dan perlindungan konsumen
- g. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota dewan gubernur bank indonesia
- h. Anggota *ex-officio* dari kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I kementerian keuangan.

2. Pelaksana Kegiatan Oprasional

- a. Ketua dewan komisioner memimpin bidang manajemen strategis
- b. Wakil ketua dewan komisioner memimpin bidang manajemen strategis II
- c. Kepala eksekutif pengawas perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan
- d. Kepala eksekutif pengawas pasar modal memimpin bidang pengawas sektor pasar modal
- e. Kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawas sektor IKNB, ketua dewan audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko
- f. Anggota dewan komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

I. Pimpinan OJK

OJK dipimpin oleh sembilan dewan komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan dewan komisioner tersebut terdiri atas :

1. Seorang Ketua
2. Seorang Wakil Ketua
3. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan
4. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal

5. Seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan Non-Bank
6. Seorang ketua dewan audit
7. Seorang anggota yang menbidangi edukasi dan perlindungan konsumen
8. Seorang *ex-officio* dari bank indonesia
9. Seorang *ex-officio* dari kementerian keuangan

Jabatan yang ada di OJK yaitu, untuk membantu tugasnya, dewan komisioner mengangkat penjabat struktural maupun fungsional antara lain deputy komisioner, direktur dan penjabat dibawahnya.

Deputi Komisioner

Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada dibawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah sembilan pembedangan Deputi Komisioner OJK :

1. Deputi komisioner manajemen strategis I
2. Deputi komisioner manajemen strategis IIA
3. Deputi komisioner manajemen strategis II B
4. Deputi komisioner audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas
5. Deputi komisioner pengawas pasar modal I
6. Deputi komisioner pengawas pasar modal II
7. Deputi komisioner pengawas industri keuangan Non Bank I
8. Deputi komisioner pengawas industri keuangan Non Bank II
9. Deputi komisioner edukasi dan perlindungan konsumen

Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

J. Strategi OJK Untuk Merealisasikan Visi Dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki beberapa strategi utama, yaitu :

1. Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan.

Strategi ini bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrase sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada arsitektur

pengembangan sektor jasa keuangan yang mensinergikan berbagai *master plain* yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

2. Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan.

Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu, juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.

3. Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan.

Strategi ini ditempu dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.

4. Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan.

Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistematis dimasing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.

5. Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan.

Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara diseluruh lembaga jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu kedepan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses *fit and proper test* pengurus lembaga keuangan.

6. Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif.

Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama-sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level *playing field* yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.

7. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan *capacity building* bagi pengawas.

8. Meningkatkan tata kelola internal dan *quality assurance*.

Untuk keperluan ini OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

K. Pembiayaan OJK

1. Sumber Pembiayaan OJK

Menurut UU OJK Pasal 34, anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

2. Pungutan Ke Pelaku Industri Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah.

3. Praktik Pungutan Di Luar Negeri

Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasannya melakukan pungutan. Berikut ini adalah tipe pungutan yang diberlakukan di beberapa negara, seperti :

a. Hongkong`

Hongkong menerapkan pungutan atas dasar layanan. Pembebanan dilakukan dalam proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya oleh HKMA (Bank Sentral Hongkong yang bertindak sekaligus sebagai pengawas bank).

b. Estonia

Pungutan di negara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1). Atas dasar layanan
- 2). Atas dasar volume

Besarnya pembebanan di dasarkan atas daftar tarif perlayanan. Pembebanan berdasarkan volume, 1 (satu) persen dari kebutuhan modal minimum bank. Memiliki daftar persentase pembebanan sesuai dengan aset

yang diawasi. Metodologinya adalah jumlah beban pengawasan setahun lalu dikurangi proyeksi pungutan atas dasar jenis layanan, lalu dikurangi target pungutan atas dasar 1 (satu) persen dari modal. Sisanya dipungut atas dasar persentase aset.

c. Slovakia

Negara ini menerapkan pungutan dengan dua sistem, yaitu :

- 1). Atas dasar layanan
- 2). Atas dasar volume

Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan.

Kemudian, pembebanan berdasarkan volume dengan aturan :

- a). 0,0027 % dari aset dengan minimum € 100.000 untuk bank asing atau cabang bank asing.
- b). 0,0133 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk asuransi.
- c). 0,0118 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk dana pensiun.
- d). 0,0170 % dari aset dengan minimum € 2.000 untuk perusahaan sekuritas.

L. Hubungan Kelembagaan OJK

1. Hubungan OJK dengan BI

Menurut pasal Undang-Undang Nomor 21 Pasal 39 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan , misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dan valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK:

- a. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga yang dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi.
- b. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini , BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat (*timely basis*). Informasi strategis yang

dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang sangat mudah menunjang efektivitas pelaksanaan tugas.

- c. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitu juga sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasi bank tertentu mengalami kondisi yang memberuk maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Kerjasama *reciprocal* dimaksud sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerjasama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.

2. Hubungan OJK dengan LPS

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Pasal 41 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.⁴³

⁴³ <https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada BAB ini penulis akan membahas serta menjelaskan tentang hasil penelitian yang berjudul “**ANALISIS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL 4.0 DALAM PERMINTAAN TENAGA KERJA DISEKTOR PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**”. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa kumpulan data statistik tenaga kerja yang terdapat pada sektor perbankan syariah indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022, data tentang tenaga kerja yang terdapat pada sektor perbankan syariah tersebut didapatkan ;angsung dari website resmi milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Hasil Penelitian

1. Mengumpulkan Data Tenaga Kerja Disektor Perbankan Syariah Indonesia

Langkah awal pada penelitian ini adalah mengumpulkan data tentang tenaga kerja yang terdapat disektor perbankan syariah indonesia. Data tersebut didapatkan dari kumpulan data statistik perbankan syariah indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data bulanan tentang tenaga kerja yang terdapat pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan total tenaga kerja yang terdapat yang pada BUS dan UUS, selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022.

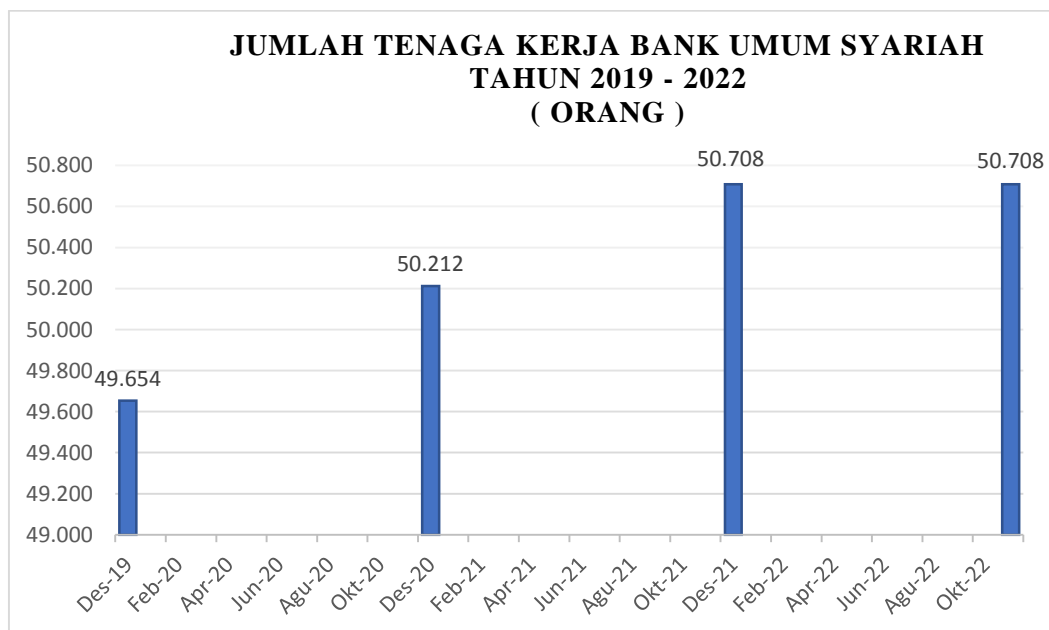
2. Mereduksi Data Tenaga Kerja Disektor Perbankan Syariah Indonesia

Setelah melalui tahap pengumpulan data pada tahapan awal, langkah selanjutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan tahap mereduksi data. Mereduksi data sendiri memiliki arti yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal pokok lalu mencari tema dan pola. Pada tahap awal penulis telah melakukan proses pengumpulan data, yang dimana data yang dikumpulkan tersebut merupakan data statistik perbankan syariah indonesia yang dikeluarkan/ dipublish setiap bulannya oleh website resmi milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022.

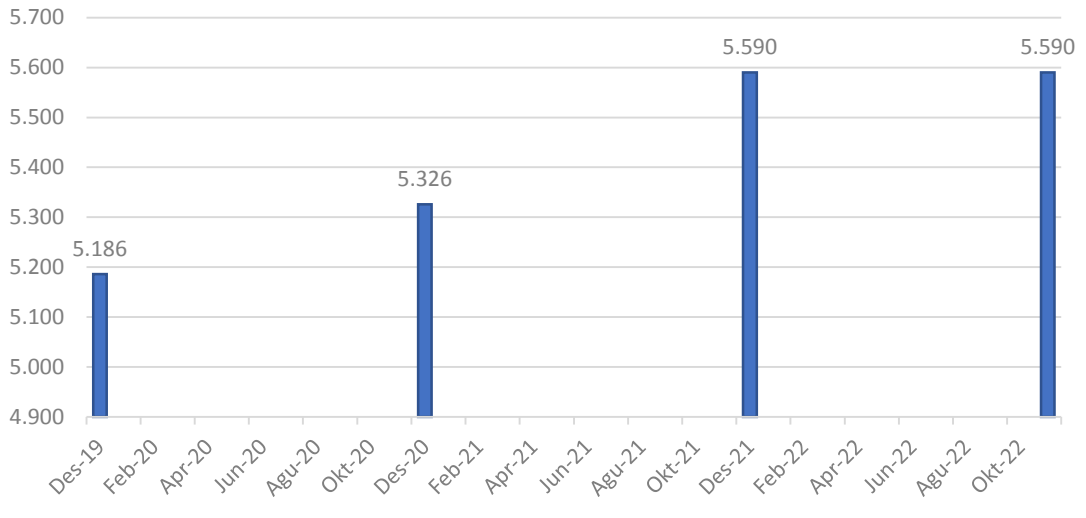
Di dalam data statistik perbankan syariah indonesia tersebut terdapat banyak sekali laporan-laporan / data-data yang berkaitan dengan perbankan syariah indonesia. Namun, pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada satu data pokok yang berkaitan dengan judul penelitian, data tersebut merupakan data tenaga kerja yang terdapat disektor perbankan syariah indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022. Jadi, proses pereduksian data pada penelitian ini berfokus kepada data tenaga kerja yang terdapat disektor perbankan syariah indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022.

3. Penyajian Data Tenaga Kerja Disektor Perbankan Syariah Indonesia

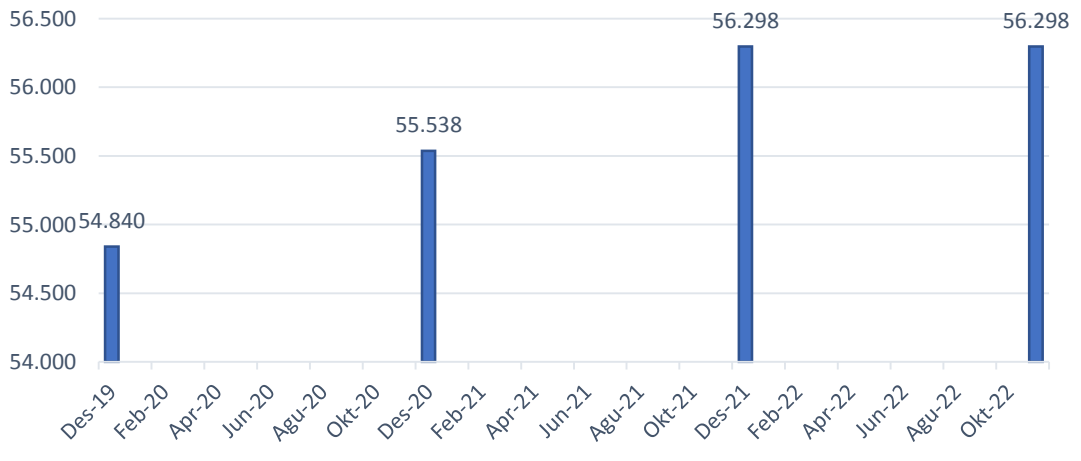
Setelah melalui tahap pengumpulan data dan tahap pereduksian data, tahap selanjutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah tahap penyajian data (*data display*). Data yang disajikan pada tahap ini adalah data tenaga kerja yang berada disektor perbankan syariah indonesia yang didapatkan dari data statistik perbankan syariah indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022.

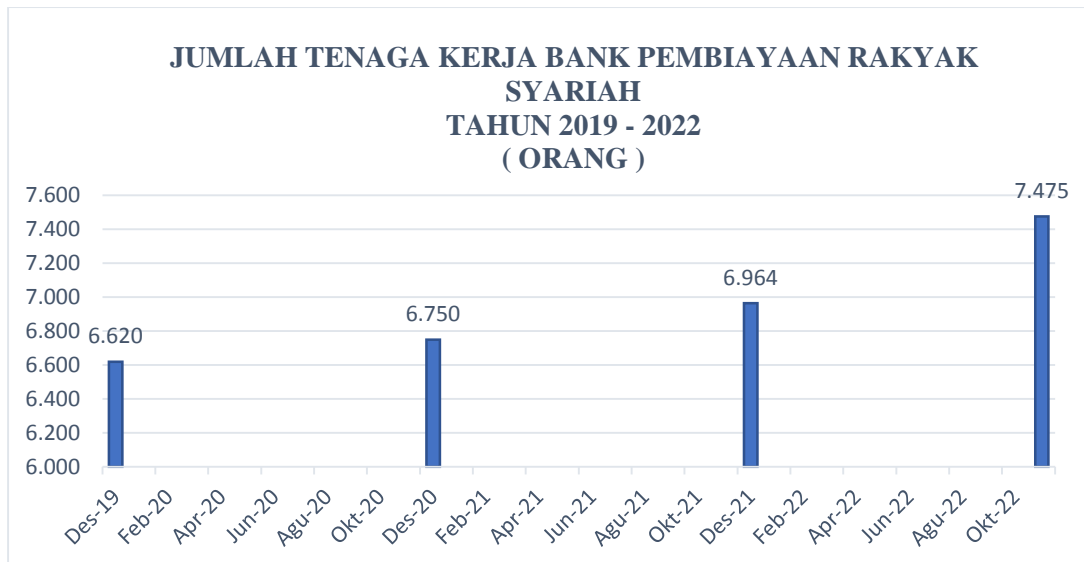


**JUMLAH TENAGA KERJA UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2019 - 2022
(ORANG)**



**TOTAL TENAGA KERJA BUS DAN UUS
TAHUN 2019 - 2022
(ORANG)**





Selain menggunakan data tentang tenaga kerja perbankan syariah Indonesia yang terdaftar pada data statistik perbankan syariah Indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022, pada penelitian ini juga menggunakan data tentang perkembangan teknologi informasi digital dibidang layanan keuangan terutama pada sektor perbankan. Perkembangan teknologi informasi yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat telah membawa masyarakat untuk memasuki era baru kehidupan, era baru tersebut biasa disebut dengan era revolusi industri 4.0. Di era ini pemanfaatan berbagai teknologi dibidang layanan keuangan telah membawa perubahan yang signifikan, salah satunya pada sektor perbankan. Perubahan pola konsumsi masyarakat kearah digital mendorong sektor perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital.

Di Indonesia sendiri perkembangan transaksi digital mengalami perkembangan yang sangat pesat yakni, sebesar 1.556 % dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2020. Lalu pada tahun 2021 transaksi uang elektronik mencapai Rp. 786,35 Triliun, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 281,39 Triliun atau sebesar 55,73 % dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 504,96 Triliun.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verivication*)

Setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya yaitu, tahap pengumpulan data, tahap pereduksian data dan tahap penyajian data, tahap selanjutnya atau tahap terakhir yang perlu dilakukan pada penelitian ini adalah tahap penarikan kesimpulan (*conclusion drawing / verivication*). Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing / verivication*) sendiri adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan

pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif dan kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang telah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya dan berdasarkan data-data yang telah disajikan sebelumnya, serta merujuk pada rumusan masalah, fokus penelitian dan tujuan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1). Saat ini teknologi digital 4.0 terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya pada sektor layanan keuangan khususnya pada sektor perbankan. Teknologi digital 4.0 sangat berperan dalam perkembangan serta kemajuan layanan-layanan yang ada di sektor perbankan. Perkembangan serta kemajuan layanan-layanan yang ada di sektor perbankan tersebut pada saat ini sudah dapat dengan mudah kita rasakan, kita gunakan serta kita akses kapanpun dan dimanapun kita berada. Seperti halnya saat nasabah ingin melakukan transaksi tarik tunai dan setor tunai, saat ini jika nasabah ingin melakukan transaksi tarik tunai dan setor tunai nasabah tersebut tidak perlu lagi jauh-jauh untuk datang langsung ke bank yang ingin dituju serta menunggu antrian untuk melakukan transaksi tarik tunai dan setor tunai tersebut di teller, nasabah tersebut cukup mendatangi ATM center terdekat untuk melakukan transaksi tarik tunai dan setor tunai tersebut, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah, tidak memerlukan waktu yang lama dan dapat dilakukan kapan saja. Selain itu, saat ini sektor perbankan sudah memiliki layanan SMS Banking, Internet Banking serta Mobile Banking, dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut nasabah dapat lebih mudah lagi untuk mengakses layanan-layanan yang ada di sektor perbankan seperti halnya, transfer, top up E-Wallet, melakukan transaksi pembayaran serta transaksi pembelian, investasi, cek mutasi rekening dan lain sebagainya, layanan-layanan tersebut dapat dengan mudah kita akses kapanpun dan dimanapun.
- 2). Teknologi digital 4.0 tidak berperan dalam permintaan tenaga kerja di sektor perbankan syariah Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat pada kurva-kurva yang telah disajikan pada tahap sebelumnya yaitu pada tahap penyajian data, pada tahap penyajian data tersebut terdapat 4 buah kurva yang menggambarkan tentang jumlah perkembangan tenaga kerja yang ada di sektor perbankan syariah Indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan

Periode November 2022. Kurva-kurva tersebut diantaranya adalah kurva jumlah tenaga kerja Bank Umum Syariah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, kurva jumlah tenaga kerja Unit Usaha Syariah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, kurva total tenaga kerja BUS dan UUS selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan kurva jumlah tenaga kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada kurva-kurva tersebut terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang ada disektor perbankan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan tidak pernah mengalami penurunan jumlah tenaga kerja selama 4 tahun belakangan ini. Oleh karena itu, melihat dari kurva jumlah tenaga kerja disektor perbankan syariah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang terus mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, biarpun teknologi digital 4.0 terus mengalami perkembangan serta kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang kehidupan dan dapat membantu memudahkan berbagai kegiatan masyarakat karena saat ini hampir seluruh kegiatan masyarakat dapat dilakukan secara digital / online, hal tersebut tidak berpengaruh pada jumlah tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan jika memang teknologi digital 4.0 disektor perbankan syariah indonesia telah berjalan dengan baik maka seharusnya jumlah tenaga kerja yang ada disektor perbankan syariah mengalami penurunan jumlah tenaga kerja pada setiap tahunnya hal tersebut dikarena tenaga manusia tersebut dapat digantikan dengan tenaga mesin / teknologi, namun pada kenyataannya jumlah tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia masih mengalami peningkatan setiap tahunnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis serta mengetahui perkembangan teknologi digital 4.0 dalam permintaan tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tenaga kerja yang terdapat disektor perbankan syariah indonesia selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022, Selain itu, data yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang perkembangan teknologi digital yang terdapat pada layanan keuangan terutama pada sektor perbankan. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman teknik analisis data terbagi dalam tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing / verivication*).

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan pada BAB sebelumnya serta merujuk pada rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada era revolusi industri 4.0 ini pemanfaatan berbagai teknologi terus mengalami perubahan serta perkembangan yang sangat pesat dan signifikan. Perkembangan yang sangat pesat dan signifikan tersebut pada akhirnya membawa semua sisi kehidupan menuju kearah yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Salah satunya ialah pada teknologi dibidang layanan keuangan khususnya pada sektor perbankan yang juga terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan, hal tersebut dapat dibuktikan melalui data perkembangan transaksi digital yang terdapat pada penjelasan yang ada pada BAB IV. Perubahan pola konsumsi masyarakat kearah digitalisasi pada akhirnya mendorong sektor-sektor perbankan untuk mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan yang berbasis digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi 4.0 memiliki peran penting dalam perkembangan yang ada pada sektor perbankan indonesia terutama pada sektor perbankan syariah indonesia.
2. Namun dalam permintaan tenaga kerja disektor perbankan syariah indonesia teknologi digital 4.0 tidak berperan dalam hal tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kurva-kurva serta penjelasan-penjelasan yang terdapat pada BAB IV, yang dimana pada BAB IV tersebut terdapat kurva-kurva serta penjelasan-penjelasan tentang jumlah tenaga kerja yang terdapat disektor perbankan syariah

Indonesia yang terus mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja pada setiap tahunnya selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut dikatakan tidak berperan dalam permintaan tenaga kerja di sektor perbankan syariah dikarenakan, jika memang teknologi digital 4.0 di sektor perbankan syariah Indonesia telah berjalan dengan baik maka seharusnya jumlah tenaga kerja yang ada di sektor perbankan syariah mengalami penurunan jumlah tenaga kerja pada setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan tenaga manusia tersebut dapat digantikan dengan tenaga mesin / teknologi, namun pada kenyataannya jumlah tenaga kerja di sektor perbankan syariah Indonesia masih mengalami peningkatan setiap tahunnya.

B. Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini ialah data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data bulanan. Selain itu, keterbatasan lainnya ialah jangka waktu yang digunakan dalam pengamatan pada penelitian ini pun terbatas yaitu mulai dari periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022 dan data yang digunakan pada penelitian ini pun terbatas hanya pada data tentang tenaga kerja di sektor perbankan syariah Indonesia yang terdaftar pada data statistik perbankan syariah Indonesia. Selain itu, keterbatasan lain yang ada pada penelitian ini adalah teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini hanyalah teknik analisis model Miles dan Huberman.

C. Saran

Berdasarkan teori, pengolahan data, dan pembahasan pada BAB sebelumnya, serta kesimpulan di atas maka peneliti ingin menyampaikan saran yaitu:

1. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang terbatas hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini hanya menggunakan data bulanan tentang tenaga kerja yang berada di sektor perbankan syariah selama periode Januari 2019 sampai dengan periode November 2022. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk menggunakan data yang cakupannya lebih luas lagi sehingga data yang didapatkan bisa lebih luas serta lebih banyak lagi dari data pada penelitian sebelumnya, serta hasil penelitian yang didapatkan pun dapat lebih baik dan lebih relevan lagi dari penelitian sebelumnya.
2. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk menggunakan teknik analisis data lainnya. Sehingga dapat menghasilkan penemuan hasil-hasil serta kesimpulan baru yang lebih baik dan lebih relevan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Yadli Yanuar, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2001), Hlm. 53
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), Hlm. 2-3.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fikih dan Keuangan*, (Depok : Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada, 2017) Edisi Kelima, Cet. 5, Hlm. 18 .
- Anisa Indah Mutiasari, *Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital*, Vol. Ix, No. 2, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2020, Hal. 32 - 33
- Darwin Prinst, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra, 2000), Hlm. 213.
- Devi Lestiyasari, *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*, (Surabaya : Fakultas Ekonomi Unnesa)
- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Parama Publishing, 2012), Hlm. 14.
- Dr. H. Zuhcri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif* , (CV. Syakir Media Press, 2021), Hal. 160
- Dr. Neneng Nurhasanah, M.Hum. dan Panji Adam, S.Sy.,M.H., *HUKUM PERBANKAN SYARIAH KONSEP DAN REGULASI*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Cet. 1, Hlm. 10.
- Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang : CV. Widya Karya), Hlm. 75.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2002), Hlm. 81.
- Edy Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), cet. I, Hlm. 33.
- Edy Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, Bogor : Ghalia Indonesia cet. I, 2005, Hal. 47.
- Etistika Yuni Wijaya, Dewi Agus Sudjimat, Amat Nyoto, *Transformasi Pendidikan Abad 24 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global*, Universitas Kejuruan Malang, Vol. 1, 2016, Hlm. 264
- Fatah Syukur NC, *Teknologi Pendidikan*, (Semarang :Rasai Media Group, 2008), Hlm. 117.
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008), cet. 2, Hlm. 2.

Hoedi Prasetyo, Wahyudi Sutopo, *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset*, Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1, 2008, Hlm. 17-18.

Hoedi Prasetyo, Wahyudi Sutopo, *Industri 4.0 : Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset*, Hlm. 19.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774>

<https://tafsirweb.com/4445-surat-an-nahl-ayat-97.html>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan/syariah/default.aspx>

<https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

Ishak, Deni Darmawan, *Teknologi Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), Hlm. 179.

Kuncoro Haryo, 2001. “ *Sistem Bagi Hasil dan Stabilitas Penyerapan Tenaga Kerja*”, Media Ekonomi, Volume 7, Nomor 2 Hal 165 – 168.

La Ode Alimusa, S.E., M.Si. *Manajemen Perbankan Syariah Satu Kajian Ideologis Dan Teoritis*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2020), Hal. 3

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm. 133 – 136.

M. Suyanto, *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Andi, 2005), Hlm. 3

M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alfabeta, 2006), cet. 4, Hlm. 2.

Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 182.

Mulawarman, Dedi Aji, *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2006), Hal. 26.

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2009), Hlm. 227-229.

Rahman Fuzan, *Karakteristik Model Dan Analisa Peluang-Tantangan Industri 4.0*, Volume 04, Nomor 1, Jurnal Teknik Informatika Politeknik Hasnur, 2018, Hlm. 2.

Rudi Azis, Arul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2014), Hlm. 33.

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), Edisi 2, Hlm. 107

Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Citra, 199), Hal. 18.

Stephen Liesty, *Nasabah dan Bank : Optimalisasi Fasilitas Perbankan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2005), Hlm. 39

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti,2007), cet. 3, Hlm. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB I, Pasal 1 dan Pasal 7.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 21 PASAL 4 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hlm. 10.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah Selama Periode Januari 2019 sampai dengan November 2022

2019												
Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Bank Umum Syariah												
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	311.401	314.748	318.058	314.602	313.210	322.949	320.738	320.882	325.030	333.790	335.482	350.364
- Jumlah Bank	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- Jumlah Kantor	1.885	1.886	1.886	1.884	1.881	1.894	1.896	1.898	1.903	1.905	1.914	1.919
- KC	477	476	476	477	477	478	478	478	479	478	480	480
- KCP	1.207	1.208	1.209	1.205	1.201	1.214	1.218	1.223	1.227	1.229	1.237	1.243
- KK	201	202	201	202	203	202	200	197	197	198	197	196
- ATM	2.787	2.788	2.793	2.780	2.770	2.773	2.779	2.779	2.805	2.824	2.824	2.827
- Jumlah Tenaga Kerja	49.522	49.410	49.482	49.388	49.289	48.000	49.743	49.873	50.000	52.654	49.864	49.654
Unit Usaha Syariah												
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	155.399	158.277	161.758	161.638	159.194	163.944	160.437	162.218	165.385	166.190	172.279	174.200

- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
- Jumlah Kantor UUS	359	360	364	368	370	372	374	375	374	376	378	381
- KC	155	157	157	157	156	156	158	158	158	158	160	160
- KCP	149	148	152	154	157	157	157	157	156	157	157	159
- KK	55	55	55	57	57	59	59	60	60	61	61	62
- ATM	171	171	171	172	172	172	166	166	166	167	168	176
- Jumlah Tenaga Kerja	4.938	5.042	5.074	5.198	5.045	5.089	4.997	5.055	5.178	4.037	5.233	5.186
Total Aset BUS dan UUS (dalam miliar Rupiah)	466.800	473.025	479.815	476.240	472.404	486.892	481.174	483.099	490.415	499.981	507.761	524.564
Total Kantor BUS dan UUS	2.244	2.246	2.250	2.252	2.251	2.266	2.270	2.273	2.277	2.281	2.292	2.300
Total ATMBUS dan UUS	2.958	2.959	2.964	2.952	2.942	2.945	2.945	2.945	2.971	2.991	2.992	3.003
Total Tenaga Kerja BUS dan UUS	54.460	54.452	54.556	54.586	54.334	53.089	54.740	54.928	55.178	56.691	55.097	54.840
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah												
- Jumlah Bank	165	165	165	164	164	164	165	165	165	164	164	164
- Jumlah Kantor	469	470	496	502	507	506	535	536	539	569	569	617
- Jumlah Tenaga Kerja	4.830	4.872	4.867	5.073	5.085	5.085	5.291	5.298	5.328	5.828	5.864	6.620

2020

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Bank Umum Syariah												
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	346.373	351.014	349.950	348.294	347.108	356.330	352.823	358.851	375.157	381.846	387.482	397.073
- Jumlah Bank	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- Jumlah Kantor	1.922	1.925	1.923	1.942	1.946	1.942	1.940	1.937	1.943	1.958	2.042	2.034
- KC	480	480	478	490	490	489	491	491	490	490	490	488
- KCP	1.246	1.248	1.248	1.254	1.259	1.256	1.252	1.249	1.256	1.273	1.356	1.351
- KK	196	197	197	198	197	197	197	197	197	195	196	195
- ATM	2.825	2.826	2.827	2.830	2.835	2.837	2.749	2.754	2.755	2.763	2.777	2.800
- Jumlah Tenaga Kerja	49.723	49.806	49.923	50.345	49.950	49.956	49.996	49.813	49.978	49.902	50.261	50.212
Unit Usaha Syariah												
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	168.951	170.329	172.610	172.936	170.142	175.452	176.240	177.978	186.687	189.331	189.331	196.875
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
- Jumlah Kantor UUS	386	387	388	389	389	390	389	390	390	391	391	392

- KC	160	161	161	161	161	162	161	162	162	162	162	162
- KCP	164	164	165	166	166	166	166	166	166	167	167	169
- KK	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	61
- ATM	176	177	177	176	177	177	177	181	181	180	179	182
- Jumlah Tenaga Kerja	5.207	5.230	5.189	5.232	5.245	5.253	5.229	5.249	5.298	5.311	5.326	5.326
Total Aset BUS dan UUS (dalam miliar Rupiah)	515.324	521.344	522.560	521.230	517.250	531.782	529.063	536.829	561.843	571.177	576.813	593.948
Total Kantor BUS dan UUS	2.308	2.312	2.311	2.331	2.335	2.332	2.329	2.327	2.333	2.349	2.433	2.426
Total ATM BUS dan UUS	3.001	3.003	3.004	3.006	3.012	3.014	2.926	2.935	2.936	2.943	2.956	2.982
Total Tenaga Kerja BUS dan UUS	54.930	55.036	55.112	55.577	55.195	55.209	55.225	55.062	55.276	55.213	55.587	55.538
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah												
- Jumlah Bank	164	163	163	163	162	162	162	162	163	163	163	163
- Jumlah Kantor	618	618	620	622	622	626	626	631	624	624	627	627
- Jumlah Tenaga Kerja	6.709	6.725	6.700	6.710	6.699	6.738	6.736	6.701	6.738	6.757	6.755	6.750

2021

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Bank Umum Syariah												
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	395.476	394.862	393.168	399.886	404.353	411.461	415.155	413.937	418.766	423.170	429.733	441.789
- Jumlah Bank	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
- Jumlah Kantor	2.035	2.036	2.038	2.037	2.043	2.042	2.040	2.044	2.028	2.032	2.033	2.035
- KC	499	500	502	502	502	501	498	499	498	500	500	500
- KCP	1.344	1.346	1.346	1.345	1.350	1.350	1.350	1.351	1.337	1.337	1.339	1.343
- KK	192	190	190	190	191	191	192	194	193	195	194	192
- ATM	3.321	3.346	3.355	3.473	3.477	3.537	3.589	3.872	3.879	3.879	3.879	3.879
- Jumlah Tenaga Kerja	50.483	50.483	50.483	53.854	49.462	51.472	44.737	45.379	45.436	49.380	50.355	50.708
Unit Usaha Syariah												
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	190.565	192.651	197.204	194.091	193.833	204.737	200.923	205.147	211.575	210.614	216.279	234.947
- Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21
- Jumlah Kantor UUS	371	371	395	401	402	406	407	407	409	411	441	444

- KC	131	131	137	138	138	139	168	168	168	168	174	177
- KCP	178	178	188	168	169	169	169	169	170	171	196	201
- KK	60	60	68	67	67	70	70	70	71	72	71	66
- ATM	161	161	211	211	211	211	218	218	219	219	219	218
- Jumlah Tenaga Kerja	5.357	5.357	5.357	5.511	5.444	5.467	5.391	5.455	5.498	5.542	5.545	5.590
Total Aset BUS dan UUS (dalam miliar Rupiah)	586.041	587.513	590.372	593.977	598.186	616.198	616.078	619.084	630.341	633.784	646.012	676.735
Total Kantor BUS dan UUS	2.406	2.407	2.433	2.438	2.445	2.448	2.447	2.451	2.437	2443	2.474	2.479
Total ATM BUS dan UUS	3.482	3.507	3.566	3.684	3.688	3.748	3.807	4.090	4.098	4.098	4.098	4.097
Total Tenaga Kerja BUS dan UUS	55.840	55.840	55.840	59.365	54.906	56.939	50.128	50.834	50.934	54.922	55.900	56.298
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah												
- Jumlah Bank	163	163	163	163	163	163	163	165	165	163	163	164
- Jumlah Kantor	627	629	631	635	637	639	650	648	670	661	649	659
- Jumlah Tenaga Kerja	6.762	6.770	6.800	6.787	6.786	6.767	6.809	6.818	6.895	6.870	6.865	6.964

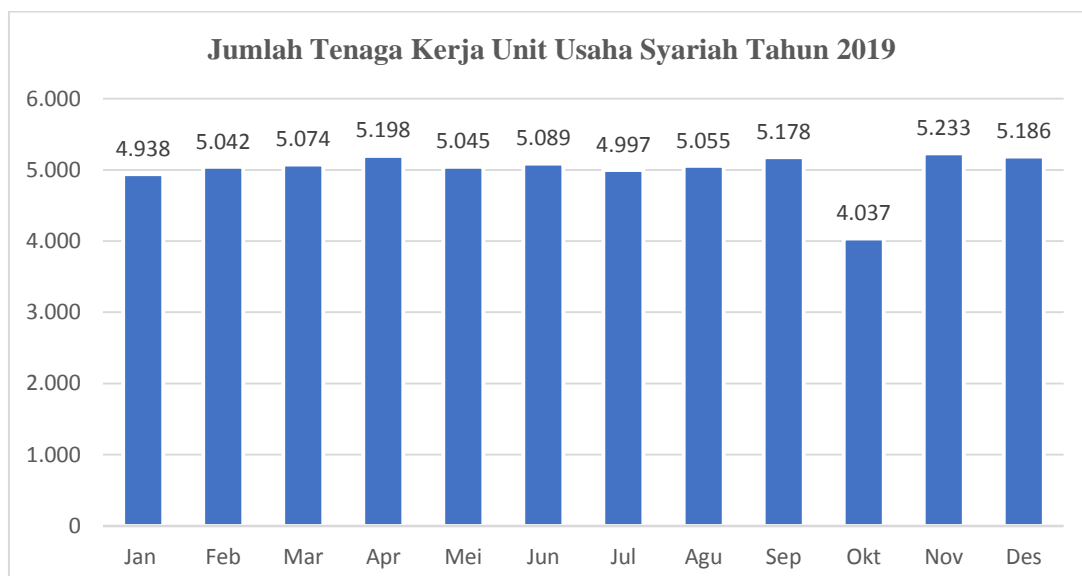
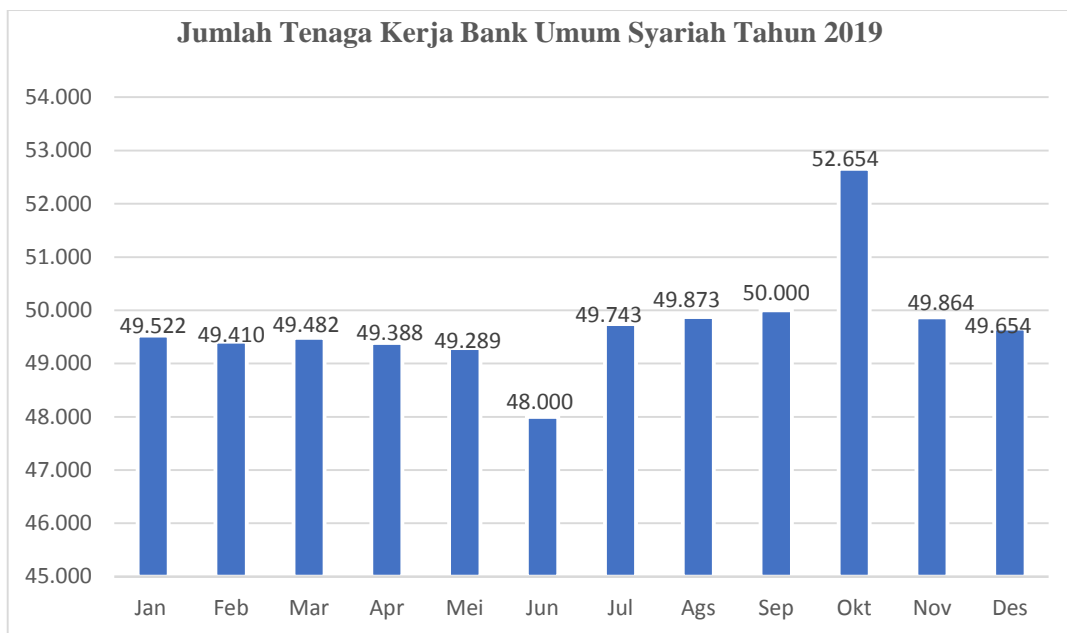
2022

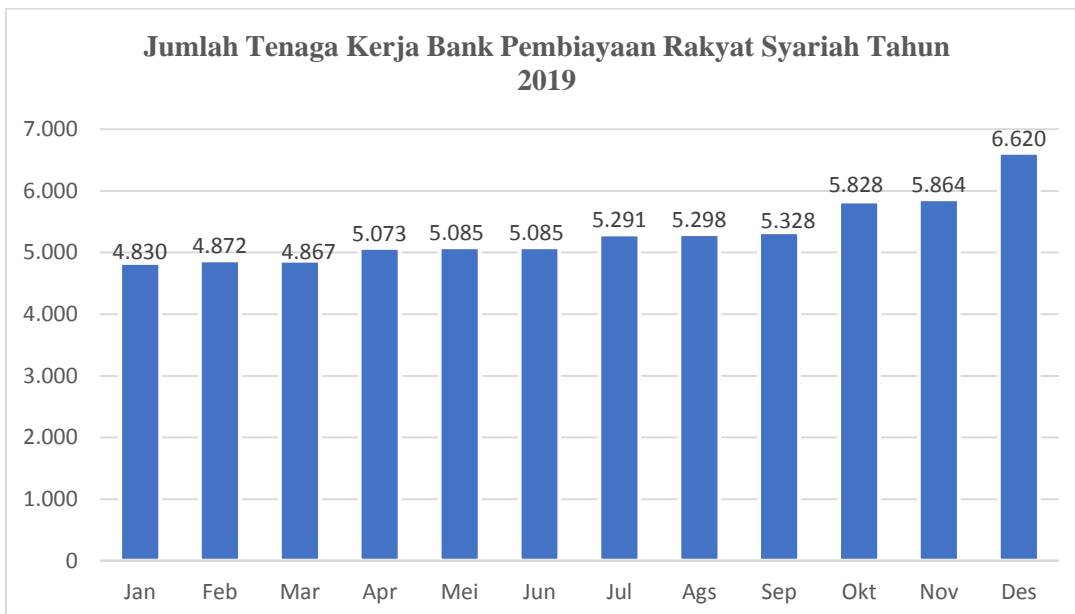
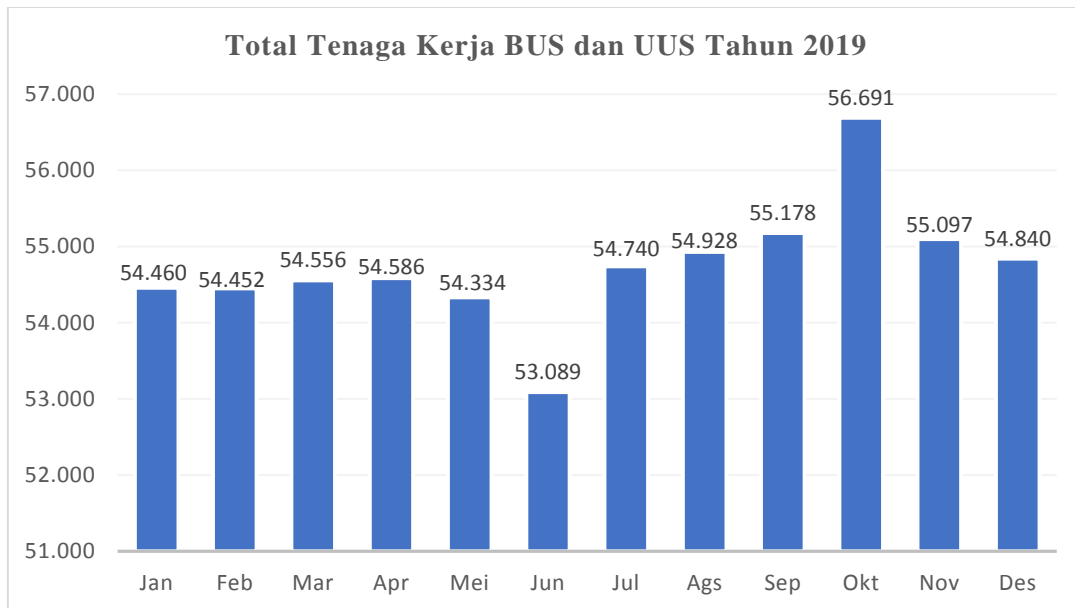
Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
Bank Umum Syariah											
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	443.380	446.454	446.850	448.063	453.876	458.997	461.971	492.536	494.947	498.618	502.571
- Jumlah Bank	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
- Jumlah Kantor	2.036	2.036	1.859	1.813	1.811	1.811	1.811	1.971	1.972	1.972	2.002
- KC	499	499	491	482	481	481	481	502	502	502	390
- KCP	1.345	1.345	1.186	1.153	1.153	1.154	1.154	1.287	1.289	1.295	1.600
- KK	192	192	182	178	177	176	176	182	181	175	12
- ATM	3.807	3.087	3.847	3.880	3.887	3.938	3.945	4.124	4.339	4.358	4.364
- Jumlah Tenaga Kerja	50.708	50.708	50.708	50.708	50.708	50.708	50.708	50.708	50.708	50.708	50.708
Unit Usaha Syariah											
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	217.642	218.438	227.536	220.943	226.214	244.554	241.196	223.739	235.984	226.508	234.175
- Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	20
- Jumlah Kantor UUS	444	444	439	440	444	445	445	427	427	432	434

- KC	178	178	178	178	178	178	178	177	177	178	178
- KCP	201	201	195	196	198	199	199	189	191	196	199
- KK	66	66	67	67	69	68	68	61	59	58	57
- ATM	218	218	226	226	228	228	227	198	197	197	199
- Jumlah Tenaga Kerja	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	5.90	5.590	5.590	5.590
Total Aset BUS dan UUS (dalam miliar Rupiah)	661.022	664.892	674.385	669.006	680.090	703.551	703.167	726.274	730.931	725.126	736.745
Total Kantor BUS dan UUS	2.480	2.480	2.298	2.253	2.255	2.256	2.256	2.398	2.399	2.404	2.436
Total ATM BUS dan UUS	4.025	4.025	4.073	4.106	4.115	4.166	4.172	4.322	4.536	4.555	4.563
Total Tenaga Kerja BUS dan UUS	56.298	56.298	56.298	56.298	56.298	56.298	56.298	56.298	56.298	56.298	56.298
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah											
- Jumlah Bank	164	164	165	165	165	165	166	166	167	167	167
- Jumlah Kantor	662	663	665	660	655	657	649	649	666	659	658
- Jumlah Tenaga Kerja	7.005	6.977	6.972	7.068	7.090	7.124	7.246	7.199	7.392	7.457	7.475

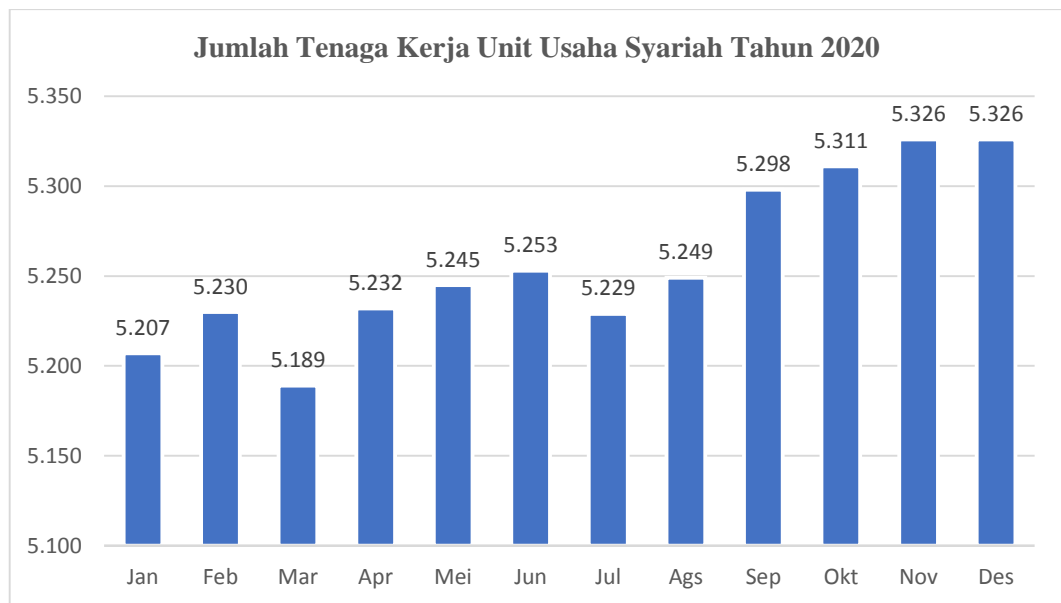
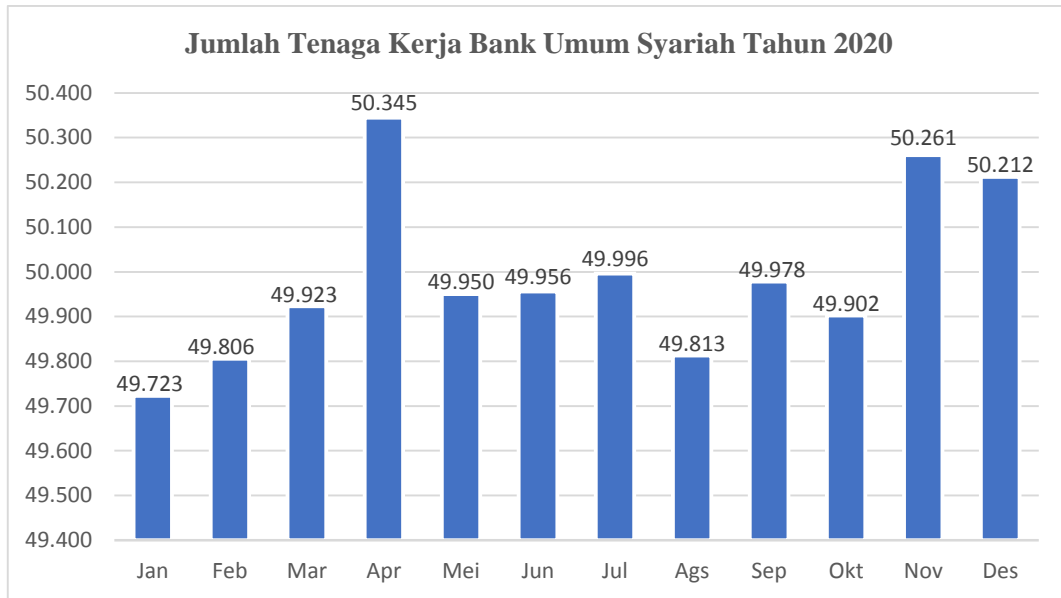
Lampiran 2 : Data Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja disektor Perbankan Syariah Indonesia Selama Peride Januari 2019 sampai dengan November 2022

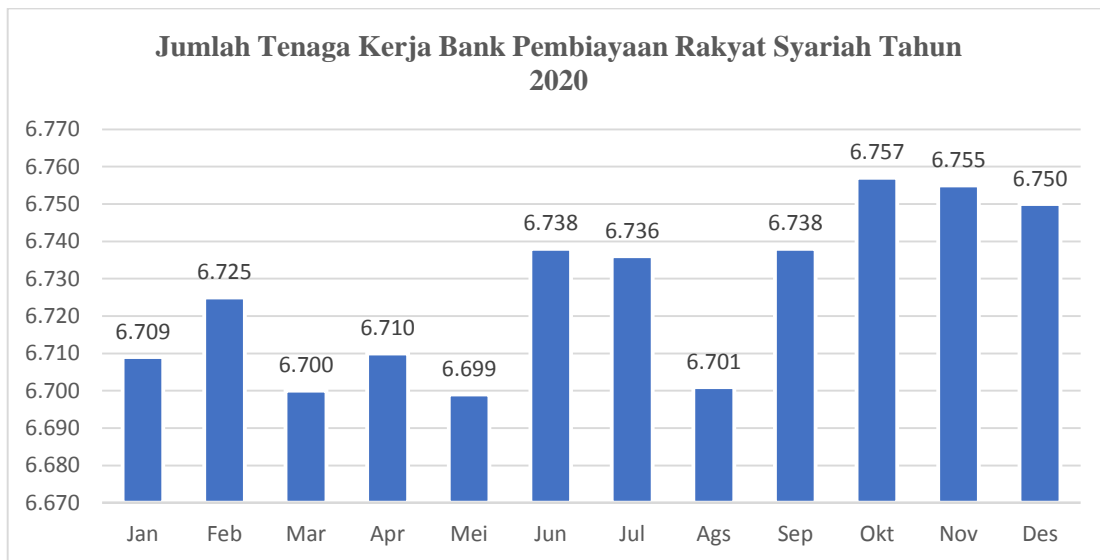
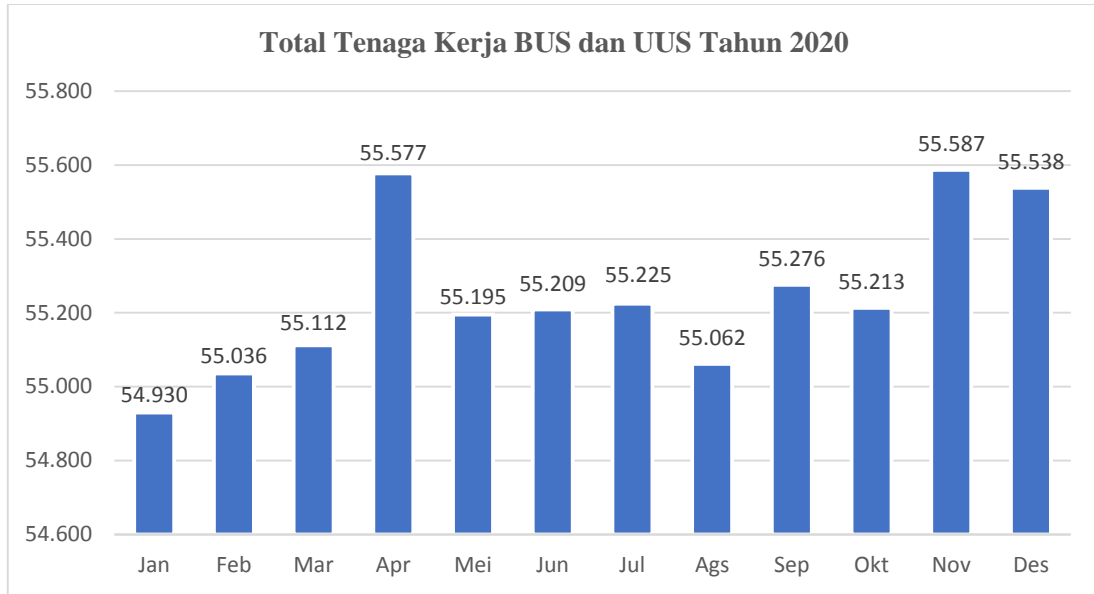
Kurva 1. Tenaga Kerja Disektor Perbankan Syariah Indonesia Periode Januari 2019 sampai dengan periode Desember 2019



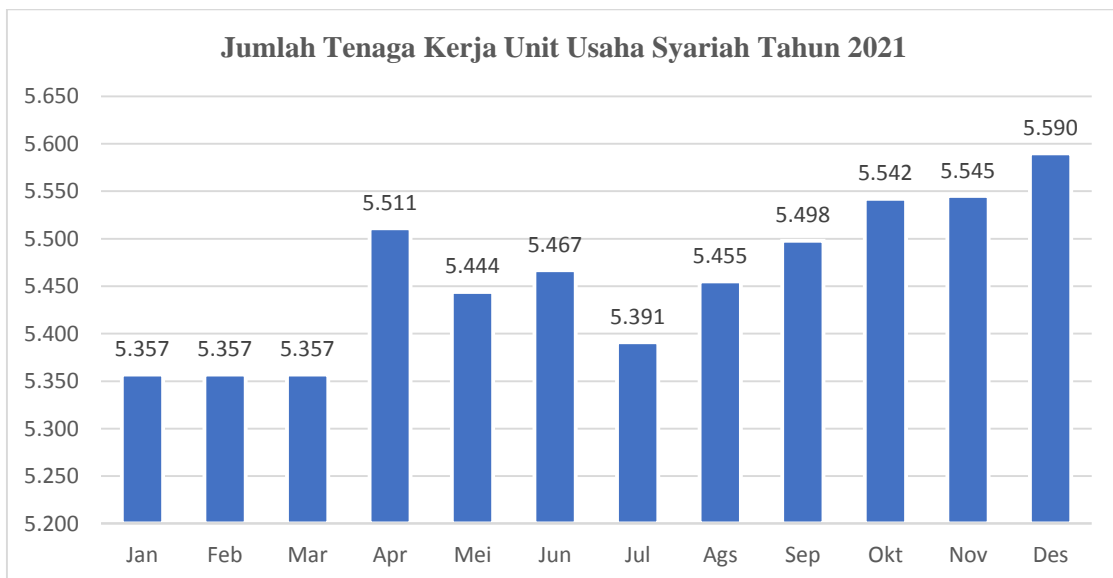
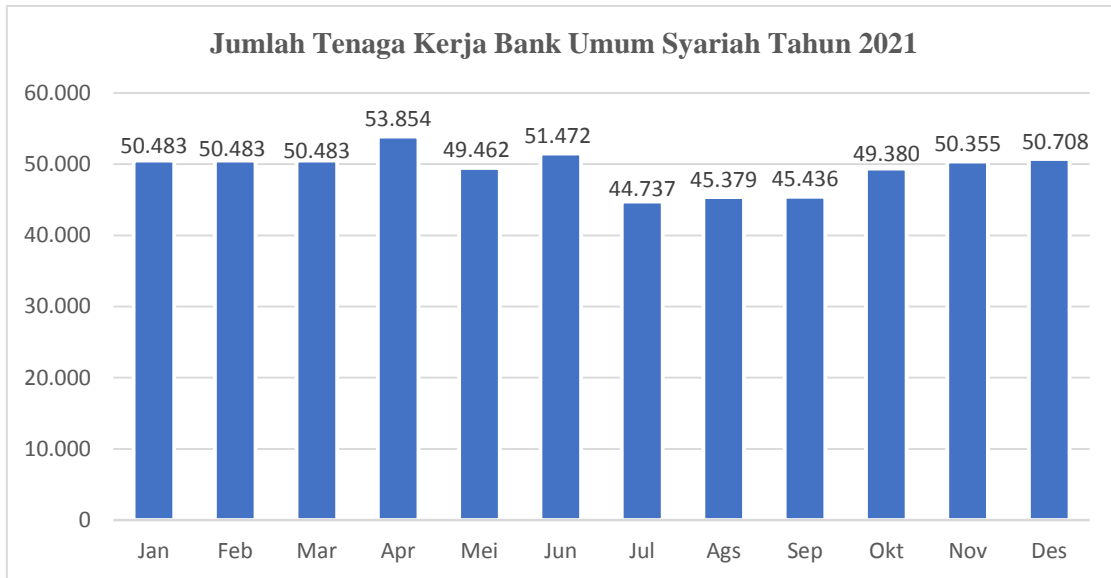


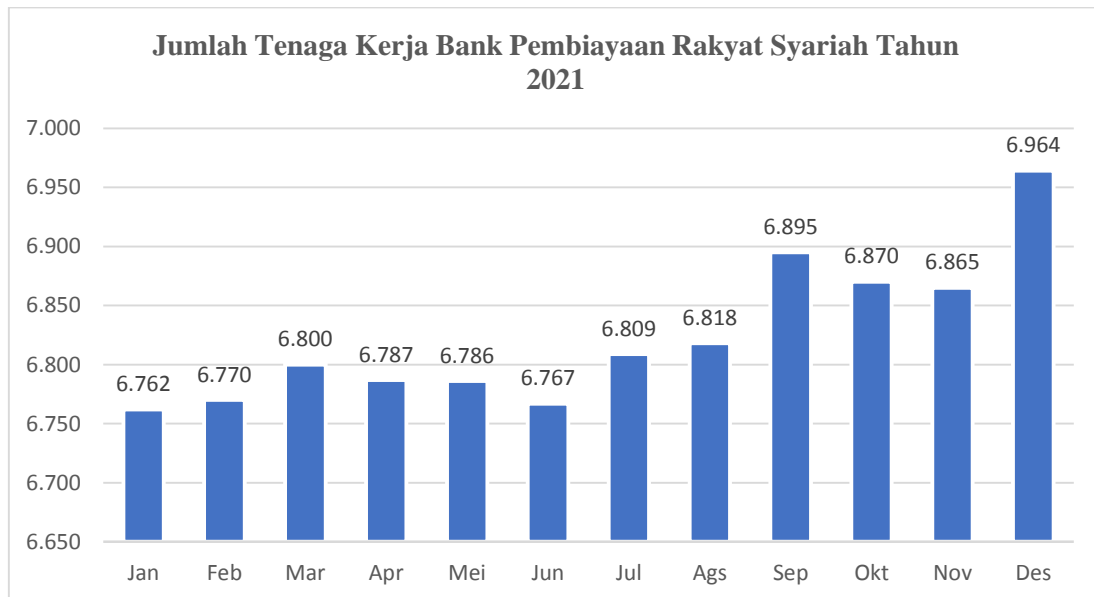
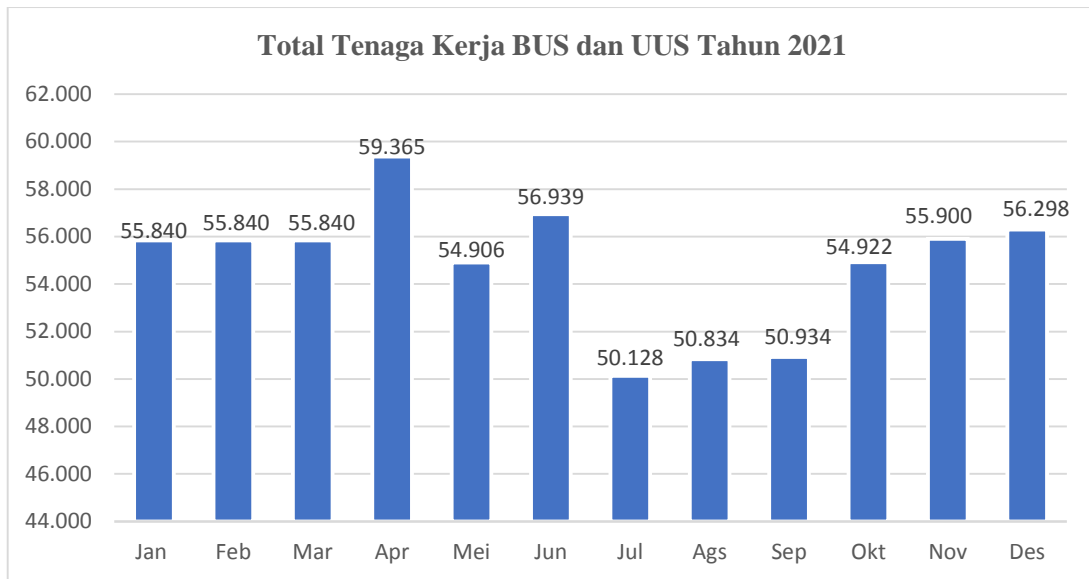
Kurva 2 : Tenaga Kerja Disektor Perbankan Syariah Indonesia Periode Januari 2020 sampai dengan periode Desember 2020





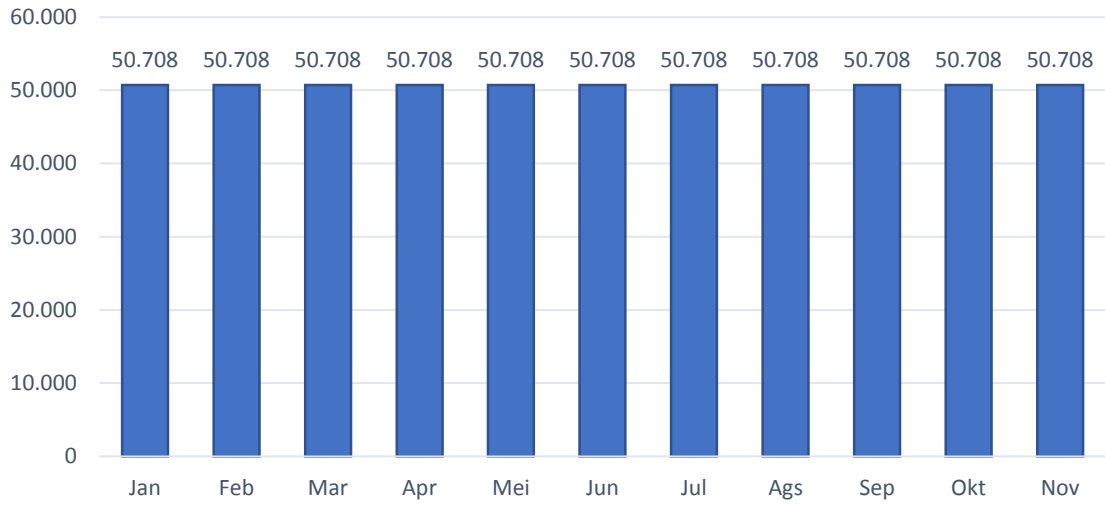
Kurva 3 : Tenaga Kerja Disektor Perbankan Syariah Indonesia Periode Januari 2021 sampai dengan periode Desember 2021



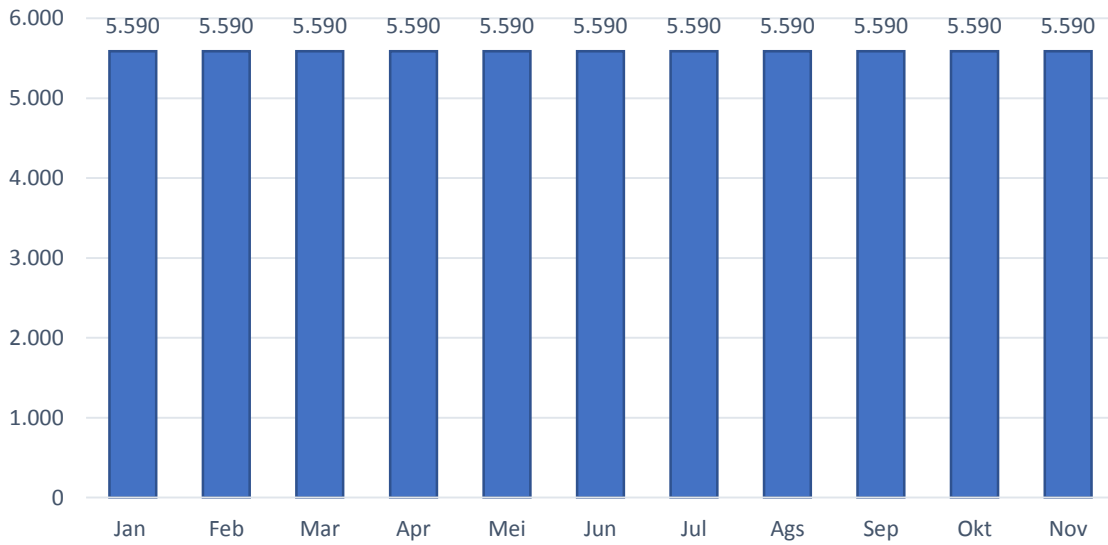


Kurva 4 : Tenaga Kerja Disektor Perbankan Syariah Indonesia Periode Januari 2022 sampai dengan periode November 2022

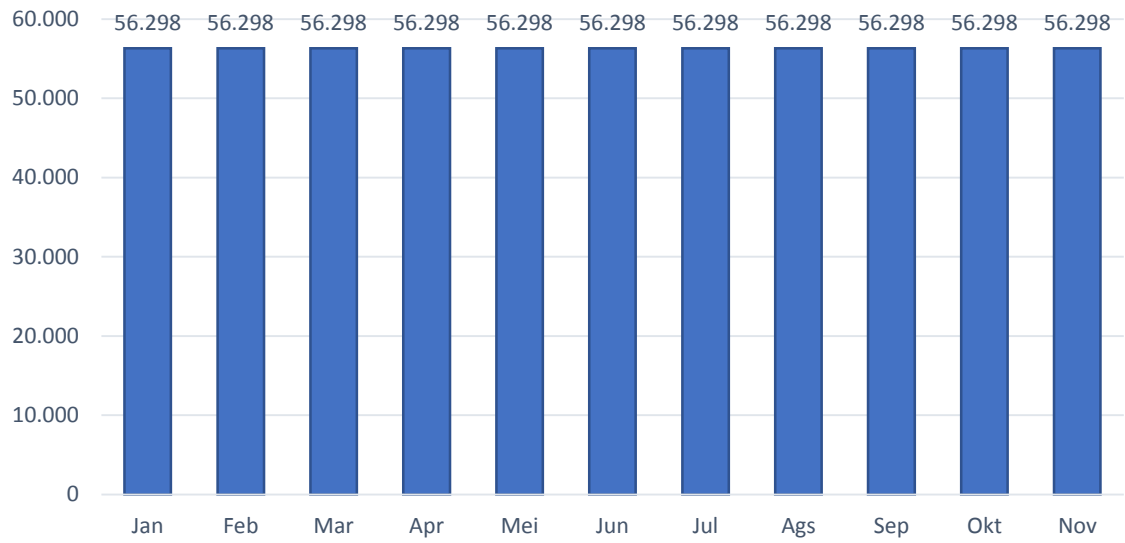
Jumlah Tenaga Kerja Bank Umum Syariah Tahun 2022



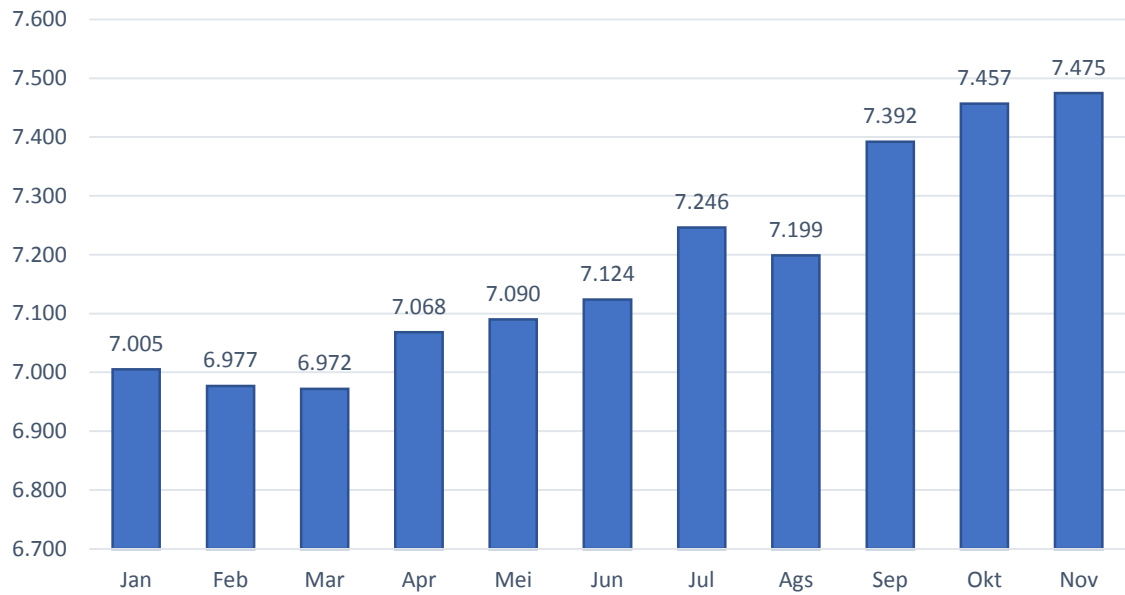
Jumlah Tenaga Kerja Unit Usaha Syariah Tahun 2022



Total Tenaga Kerja BUS dan UUS Tahun 2022



Jumlah Tenaga Kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2022



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nur Fitriya Eka Nanda
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 18 Januari 1999
Alamat : Jl. Pasir Panjang, Perumahan BTN Tora Graha Asri Blok B
No.11, RT 13, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan
Tengah
No. Hp : 085751978383
Email : cahayasucipertama@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK TUNAS RIMBA (Tahun Lulus 2005)
SD / MI : SD NEGERI 5 RAJA (Tahun Lulus 2011)
SMP / MTS : SMP NEGERI 7 ARUT SELATAN (Tahun Lulus 2014)
SMA / MA : MAN KOTAWARINGIN BARAT (Tahun Lulus 2017)